



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI XII DPR RI
DENGAN KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
(BPH MIGAS)**

- Tahun Sidang : 2024-2025
Masa Persidangan : I
Rapat ke-
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Senin, 18 November 2024
Waktu : Pukul 10.15 s.d. 14.46 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi XII DPR RI
Gedung Nusantara I DPR RI
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
- Ketua Rapat : Bambang Patijaya, S.E., M.M. (Ketua Komisi XII DPR RI/F-P.Golkar)
- Acara : 1. Perkenalan
2. Progres dan Evaluasi Pelaksanaan Program hingga Triwulan ke-3 Tahun 2024
3. Program Strategis Tahun 2025
4. Lain-lain
- Sekretaris Rapat : Dwiyanti, S.Sos. (Kepala Bagian Setretariat Komisi XII Setjen DPR RI)
- Hadir : **A. ANGGOTA DPR RI:**
25 dari 45 orang Anggota dengan rincian:
- 1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (F-PDI PERJUANGAN)**
3 dari 8 orang Anggota:
 1. H. Dony Maryadi Oekon, S.T. (Wakil Ketua)
 2. H. Yulian Gunhar, S.H., M.H.
 3. Shanty Alda Nathalia, S.H.
 - 2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (F-P.GOLKAR)**
3 dari 8 orang Anggota:
 1. Bambang Patijaya, S.E., M.M. (Ketua)
 2. Drs. Mukhtarudin
 3. Dewi Yustisiana, S.H., M.Kn.
 - 3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (F-P.GERINDRA)**
3 dari 7 orang Anggota:

1. H. Rokhmat Ardiyan, M.M.
2. Dr. Ramson Siagian
3. Rocky Candra

**4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
(F-P.NASDEM)**

3 dari 4 orang Anggota:

1. Irsan Sosiawan, M.B.A.
2. Gulam Mohamad Sharon
3. Dr. Syarif Fasha, S.E., M.E.

**5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
(F-PKB)**

3 dari 5 orang Anggota:

1. N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H.,
M.Kn.
2. Rico Alviano, S.T.
3. Syarifuddin, S.Pd.

**6. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
(F-PKS)**

4 dari 4 orang Anggota:

1. Dr. H. Muh. Haris, S.S., M.Si.
2. Nevi Zuairina
3. H. Jalal Abdul Nasir, Ak.
4. Hj. Meitri Citra Wardani, S.H.

7. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

3 dari 4 orang Anggota:

1. Putri Zulkifli Hasan, S.Mn., M.Bus.
(Wakil Ketua)
2. Aqib Ardiansyah, M.Si.
3. H. Moh. Eddy D. Soeparno, S.H., M.H.

8. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-P. DEMOKRAT)

3 dari 5 orang Anggota:

1. Ir. H. Mulyadi
2. Dra. Nurwayah, S.Pd.
3. Zulfikar Hamonangan, S.H.

B. PEMERINTAH/UNDANGAN

1. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) beserta jajarannya

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M./F-P. GOLKAR):

Bisa dimulai ya? Saya mulai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Shalom,
Om swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan.

Yang kami hormati Bapak-Ibu Anggota Komisi XII DPR RI, Kemudian juga yang kami hormati Kepala BPH Migas, dan Para Anggota Komite BPH Migas beserta jajaran, dan Hadirin sekalian yang tidak bisa kami sapa satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat kami.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada hari ini kita semua dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BPH Migas guna melaksanakan tugas-tugas konstitusional kita. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesediaan Bapak-Ibu Anggota Komisi XII DPR RI untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat pada pagi hari ini.

Sesuai dengan undangan yang telah disampaikan dan berdasarkan jadwal rapat Komisi XII DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, maka pada hari ini Komisi XII DPR RI akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BPH Migas dalam rangka pengawasan, dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dengan agenda:

1. Perkenalan;
2. Progres dan evaluasi pelaksanaan program hingga triwulan ketiga tahun 2024;
3. Kemudian yang ketiga program strategis tahun 2025; dan
4. Lain-lain.

Berdasarkan data dari sekretariat, Anggota Komisi XII DPR RI yang telah hadir berjumlah 12 orang dari 45 Anggota Komisi XII yang terdiri atas 6 fraksi dari 8 fraksi yang ada. Dengan demikian telah kuorum sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 281 ayat (1) telah terpenuhi dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1) menyatakan bahwa setiap rapat DPR RI bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup. Oleh karena itu Pimpinan meminta persetujuan Anggota agar rapat ini bersifat terbuka. Apakah dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Baik, atas persetujuan Anggota dan dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.15 WIB)

Sebelum melanjutkan rapat ini kami meminta persetujuan Bapak-Ibu Anggota Komisi XII bahwa rapat ini *nggak* usah panjang-panjang *lah* ya, selama-lamanya 2 jam setelah dimulai, kalau lebih cepat lebih baik dan dapat diperpanjang lagi sesuai dengan kesepakatan Bersama. Apakah dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Oke.

Bapak-Ibu yang saya hormati,

Mengawali pertemuan ini izinkan kami perkenalkan terlebih dahulu Anggota Komisi XII, lalu Mbak Putri Zuhas sebagai salah satu Pimpinan Anggota Komisi XII DPR RI periode 2024-2029 yang telah hadir pada hari ini. Kita persilakan kepada rekan-rekan untuk memperkenalkan diri bergilir dari Fraksi PDIP dan seterusnya. Silakan.

F-PDI PERJUANGAN (SHANTY ALDA NATHALIA, S.H.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Shalom.
Om swastiastu.
Namo Buddhaya.
Salam kebaikan.

**Yang terhormat Bapak-Ibu Pimpinan Sidang,
Rekan-rekan Anggota DPR RI, khususnya Pimpinan dan Anggota Komisi XII,
Yang saya hormati Ibu Kepala BPH Migas, Ibu Erika Retnowati beserta seluruh jajaran Pimpinan yang ikut hadir dalam RDP ini.**

Perkenalkan, saya Shanty Alda Nathalia, nomor anggota A-207, saya dari Dapil IX Jateng meliputi Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes. Salam kenal, saya mendoakan semoga Ibu Ratna dapat mengemban tugas dengan baik dan dapat membawa BPH Migas ke depannya lebih maju lagi.

Demikian dari saya.

f

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, Ibu Santi Alda Natalia. Aldanya bukan yang penyanyi, tapi Anggota DPR.

Lalu berikutnya dari Golkar, masih *skip* ya. Dari Gerindra silakan kepada Kapoksi, Bapak Rokhmat.

F-P.GERINDRA (H. ROKHMAT ARDIYAN, S.Sos. M.M.):

Izin, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,
Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua.

Izin, nama saya Rokhmat Ardiyan, Kapoksi dari Partai Gerindra. Partai Gerindra di Komisi XII total ada 7 orang. Semoga BPH Migas beserta jajarannya, Ibu Kepala beserta jajarannya bisa bersinergi terus, saling menguatkan terhadap program-program pemerintah Pak Prabowo dan Gibran. Kita bisa hadir untuk mengatasi kesulitan kesulitan di bidang distribusi dan saya ucapkan terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, selanjutnya kami persilakan kepada rekan-rekan dari Nasdem.

F-P.NASDEM (Dr. SYARIF FASHA, S.E., M.E.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Fasha, A-374, Dapil Jambi, Fraksi Nasdem.

Saya ucapkan terima kasih RDP pagi ini dengan BPH Migas. Semoga ke depan BPH Migas lebih *concern* lagi terkait dengan penyaluran BBM, kuota-kuota BBM maupun yang terkait dengan subsidi dan penugasan.

Terima kasih, Pimpinan.

WAKIL KETUA KOMISI XII (PUTRI ZULKIFLI HASAN, S.Mn., M.Bus./F-PAN):

Izin melanjutkan. Dari PKB, silakan. Belum hadir? Oke, kita lanjut ke PKS. *Monggo*, Ibu.

F-PKS (NEVI ZUAIRINA):

f

Terima kasih, Pimpinan dan Anggota Dewan Komisi XII.
Yang kami hormati dari BPH Migas bersama jajaran.

Saya Ibu Nevi Zuarina dari Dapil Sumbar II, Fraksi PKS. Itu saja, Pimpinan.

Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI XII (PUTRI ZULKIFLI HASAN, S.Mn., M.Bus./F-PAN):

Terima kasih.

PKS baru satu orang ya. Kita lanjut Fraksi PAN. Ada lagi PKS? *Oh ya, silakan, Pak Jalal.*

F-PKS (H. JALAL ABDUL NASIR, Ak.):

Terima kasih, Pimpinan.

Ibu Kepala BPMS dan segala staf yang hadir,

Perkenalkan, saya Jalal Abdul Nasir dari Dapil Jawa Barat VII, Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta, Fraksi PKS.

Tadi pagi saya kontak nelayan di Karawang ya, mereka berterima kasih SPBE-nya sudah memadai untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan solar nelayan.

Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI XII (PUTRI ZULKIFLI HASAN, S.Mn., M.Bus./F-PAN):

Iya. PKS ada lagi? Sudah?

Kita lanjut dulu ke Fraksi PAN. *Wah, di Dapil semua, Ketua, Fraksi PAN.*

Kita lanjut dulu ya ke Fraksi Demokrat. Pak Mul, silakan.

F-P.DEMOKRAT (Ir. H. MULYADI):

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Yang saya hormati Pimpinan serta seluruh Anggota Komisi XII,
Kepala dan Anggota BPH Migas beserta seluruh jajaran.**

Perkenalkan saya Mulyadi, daerah pemilihan Sumatera Barat II dari Fraksi Partai Demokrat. Muka baru stok lama, Pak. Ini sudah yang keempat

kalinya DPR, walaupun periode kemarin sempat cuti dulu gara-gara disuruh Ketua maju gubernur. Saya juga pernah di sini tahun 2014 di Komisi Energi, sekarang menjadi Komisi XII. Mudah-mudahan peran dari BPH Migas ini bisa lebih *greget*, Pak, karena dia fungsinya *kan* salah satu yang paling strategis adalah mengawasi, Pak. Sementara persoalan BBM ilegal, BBM tidak tepat sasaran, harusnya BPH Migas bisa mengambil peran yang lebih sentral ya dalam persoalan-persoalan yang sampai saat ini belum selesai-selesai kelihatannya. Bahkan pemerintah saya dengar akan segera mengubah pola subsidi dari produk ke bantuan langsung ke masyarakat. Mudah-mudahan sudah dibicarakan dengan BPH Migas bersama pemerintah, sehingga pola yang disiapkan betul-betul lebih baik dari yang ada saat ini.

Saya rasa demikian.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI XII (PUTRI ZULKIFLI HASAN, S.Mn., M.Bus./F-PAN):

Baik, kita lanjut. Ibu Nurwayah dari Demokrat, silakan.

F-P.DEMOKRAT (NURWAYAH, S.Pd.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat datang kepada Kepala BPH Migas beserta jajaran, salam kenal. Saya Nurwayah dari Fraksi Demokrat, daerah pemilihan Jakarta III meliputi Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu, nomor anggota 547. Semoga Komisi XII bisa bekerja sama dengan BPH Migas dan melakukan pengawasan dengan baik dan bisa bekerja sama.

Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI XII (PUTRI ZULKIFLI HASAN, S.Mn., M.Bus./F-PAN):

Baik. Terima kasih, Bu Nurwayah.

Tadi ada yang baru hadir. Kita lanjut ke Fraksi Golkar. Ibu Dewi, silakan.

Lanjut lagi, oke. Fraksi PKS, Mbak Meitri, silakan.

F-PKS (Hj. MEITRI CITRA WARDANI, S.H.):

Baik. Terima kasih, Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Selamat pagi,
Salam sejahtera buat kita semua.

Perkenalkan nama saya Meitri dari Fraksi PKS, nomor anggota A-476, daerah pemilihan Jawa Timur VIII dari Mojokerto, Jombang, Madiun dan Nganjuk.

Selamat atas kedatangannya hari ini di Komisi XII. Tanpa mengurangi rasa hormat dan bangga untuk Kepala BPH Migas beserta jajaran, semoga ke depannya bisa bermitra dengan baik dan yang menjadi hak-hak di masyarakat bisa terjumpai dengan baik.

Mungkin itu dari saya, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI XII (PUTRI ZULKIFLI HASAN, S.Mn., M.Bus./F-PAN):

Baik, terima kasih.

Tadi ada yang baru hadir lagi dari Fraksi PKB. Pak Dipo, silakan.

F-PKB (N.M. DIPO NUSANTARA P.U., S.H., M.Kn.):

Terima kasih, Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang terhormat Kepala BPH Migas beserta jajarannya.

Saya Dipo Nusantara Pua upa, Fraksi PKB, Dapil I NTT.

Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI XII (PUTRI ZULKIFLI HASAN, S.Mn., M.Bus./F-PAN):

Terima kasih.

Ada lagi yang saya belum sebutkan untuk perkenalkan diri? Silakan, Pak Irsan dari Nasdem.

F-P.NASDEM (IRSAN SOSIAWAN, M.B.A):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Irsan Sosiawan, Fraksi Nasdem, Dapil Aceh II, nomor anggota A-367. Salam kenal Bapak-bapak semua jajaran dari BPH Migas. Salam sejahtera semua.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI XII (PUTRI ZULKIFLI HASAN, S.Mn., M.Bus./F-PAN):

Sudah semua, Bapak-Ibu? Bu Dewi, silakan.

F-P.GOLKAR (DEWI YUSTISIANA, S.H., M.Kn.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Perkenalkan saya Dewi Yustisiana dari Fraksi Partai Golkar, Dapil Sumsel II. Pada prinsipnya kami mendukung semua program pemerintah, termasuk berkenaan dengan BBM yang di mana BPH Migas berperan sebagai regulator dan pengawasannya dan tentunya kami juga berharap ke depannya peran dari BPH Migas ini bisa lebih dimaksimalkan.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI XII (PUTRI ZULKIFLI HASAN, S.Mn., M.Bus./F-PAN):

Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sepertinya sudah semua. Terakhir saya izin memperkenalkan diri, Ibu Kepala BPH Migas beserta jajarannya. Saya Putri Zulkifli Hasan, Dapil Lampung I, Fraksi Partai Amanat Nasional, nomor anggota 497.

Bapak dan Ibu yang saya hormati,

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, maka BPH Migas mempunyai tugas untuk mengatur dan menetapkan:

- a. Ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak;
- b. Cadangan bahan bakar minyak nasional;
- c. Pemanfaatan fasilitas pengangkutan dan penyimpanan bahan bakar minyak;
- d. Tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa;
- e. Harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil;
- f. Pengusahaan transmisi dan distribusi gas bumi.

Pada kesempatan pagi ini kami ingin mendengarkan penjelasan yang mendetail terkait dengan progres dan evaluasi pelaksanaan kegiatan BPH Migas yang telah berjalan hingga triwulan ketiga pada tahun 2024. Salah satu program prioritas pemerintah di sektor Migas adalah pengelolaan subsidi tepat sasaran. Apalagi baru-baru ini pemerintah berencana untuk mengubah skema

penyaluran subsidi energi menjadi bentuk lain, salah satunya adalah BLT atau Bantuan Langsung Tunai.

Oleh karena itu Komisi XII DPR RI juga ingin mendapatkan penjelasan dari Kepala BPH Migas terkait program prioritas BPH Migas untuk tahun 2025 dalam rangka mendukung program prioritas sektor energi yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Untuk efektifnya waktu pembahasan, maka kami persilakan Kepala BPH Migas untuk menyampaikan pemaparannya terkait agenda rapat pada hari ini. Mohon Kepala BPH Migas terlebih dahulu memperkenalkan para anggota komite dan jajaran yang telah hadir. Saya persilakan kepada Kepala BPH Migas untuk memulai.

KEPALA BPH MIGAS (ERIKA RETNOWATI, Ak., M.Si.):

Baik. Terima kasih, Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim.

Yang terhormat Pimpinan dan para Anggota Komisi XII DPR RI, para komite BPH Migas, Bapak/Ibu sekalian,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya.

Puji syukur kita mari panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu wa ta'ala* dan Tuhan yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya, atas karunia-Nya kita bisa bersama-sama berkumpul pada pagi hari ini di ruangan ini untuk agenda perkenalan, progres dan evaluasi pelaksanaan program hingga triwulan tiga tahun 2024 dan juga program strategis tahun 2025.

Pertama tama tentu kami mengucapkan selamat kepada Bapak-Ibu yang sudah terpilih sebagai Anggota DPR untuk periode 2024-2029 dan selanjutnya sesuai dengan agenda izinkan saya memperkenalkan Pimpinan, jajaran Pimpinan dari BPH Migas yang terdiri dari 9 orang komite dan juga ada 3 orang pejabat eselon II. Jadi di BPH Migas itu terdapat 9 orang komite di mana ketua komitenya itu saya sendiri, Erika Retnowati. Ketua komite juga bertugas sebagai Kepala BPH Migas dan saya perkenalkan satu persatu anggota komite. Pertama, Bapak Abdul Halim, kemudian Bapak Basuki Trikora Putra atau Pak Tiko, kemudian Bapak Eman Salman Arief. Kemudian Bapak Harya Adityawarman, ini mohon izin karena ada kemalangan ibunya meninggal kemarin, jadi belum bisa hadir di sini. Kemudian Bapak Iwan Prasetya Adhi, Pak Iwan, kemudian Bapak Saleh Abdurrahman, ini juga saya mohon izin karena mendampingi Pak Wamen, ada kunjungan ke Bali. Kemudian Bapak Wahyudi Anas dan terakhir Bapak Yapit Sapta putra. Jadi ada 9 orang komite untuk periode 2021 dan 2025.

Kemudian struktur organisasi di BPH Migas ini terdiri dari Kepala BPH, kemudian di bawahnya ada sekretaris, ada Direktur BBM, dan juga ada Direktur Gas Bumi. Saya perkenalkan Sekretaris BPH Migas, Bapak Patuan Alfon Simanjuntak. Kemudian Bapak Direktur BBM, Bapak Sentot Hariyadi, dan kemudian Direktur Gas Bumi, Ibu Soeryaningsih. *Nah*, inilah jajaran Pimpinan

di BPH Migas dan kami mempunyai pegawai sekitar kalau dijumlahkan itu semua hampir 280 orang yang terdiri dari pejabat tinggi pratama tadi itu 3 orang, kemudian pejabat administrasi atau koordinator 11 orang, kemudian sub koordinator atau sub bagian 25 orang, kemudian ASN yang terdiri dari PNS dan juga P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) 159 orang, dan selain itu kami juga masih mempunyai 78 anggota *non* aparatur sipil negara, yang ini masih honorer dan kita upayakan untuk bisa menjadi P3K. Kemudian kalau secara strata pendidikan di sini terbanyak adalah S1 121 orang, kemudian S2 57 orang, SLTA dan diploma 8 orang dan S3 ada 4 orang. Jadi demikian kekuatan dari pegawai BPH Migas.

Dan selanjutnya sesuai dengan agenda, izinkan saya juga memperkenalkan PIC-PIC untuk masing-masing wilayah. Jadi kami punya 9 komite, itu sudah kami bagi-bagi untuk wilayah-wilayah, ini untuk memudahkan koordinasi, ini kami sesuaikan dengan regionnya Pertamina, sesuai dengan MOR-nya. Jadi setiap MOR itu ada 2 orang komite yang menjadi PIC untuk Sumbagut (Sumatera bagian utara) itu koordinatornya Pak Harya Adityawarman, kemudian wakil koordinatornya Pak Abdul Halim dan per provinsinya juga ada PIC-nya. Kemudian Sumbagsel itu Koordinatornya Pak Abdul Halim, Wakil Koordinator Pak Eman Salman Arif.

Jawa bagian barat koordinator Pak Basuki Trikora Putra, wakil koordinator Pak Yapit. Kemudian Jawa bagian tengah koordinator Pak Iwan dengan wakil koordinator Pak Harya. Kemudian Jatimbalinus (Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara) itu koordinatornya Pak Saleh Abdurrahman dengan wakil koordinator Pak Wahyudi Anas. Kalimantan koordinator Pak Eman Salman Arief dan wakilnya Pak Abdul Halim dengan Pak Saleh Abdurrahman. Sulawesi koordinator Pak Wahyudi Anas dan wakil koordinator Bapak Iwan. Dan untuk Maluku-Papua koordinatornya Pak Yapit dengan wakil koordinator Pak Basuki Trikora Putra. Jadi, Bapak-Ibu, seandainya di Dapil masing-masing ada permasalahan atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan terkait Dapil ini bisa langsung menghubungi PIC dari masing-masing provinsi *gitu* ya, jadi supaya lebih memudahkan dan mempercepat koordinasinya, seperti itu.

Baik, selanjutnya kami ingin menjelaskan yang terkait dengan kelembagaan BPH Migas. Jadi BPH Migas ini didirikan sebagai amanat dari Undang-Undang 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa. Jadi di situ disebutkan bahwa badan pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM dan gas bumi pada kegiatan usaha hilir. Badan pengatur ini merupakan lembaga pemerintah yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya bersifat independen dan bertanggung jawab kepada presiden. Kepala badan pengatur wajib memberikan laporan kepada presiden melalui menteri, dalam hal ini Menteri ESDM, mengenai hasil kerjanya secara berkala setiap 6 bulan dan/atau apabila diperlukan.

Kemudian berikutnya yang terkait dengan tugas dan fungsi BPH Migas tadi sempat disinggung oleh Ibu Pimpinan bahwa berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, BPH Migas memiliki fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa. Selain itu BPH Migas memiliki fungsi melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak dan gas bumi yang ditetapkan pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah NKRI serta meningkatkan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri. Kemudian untuk melaksanakan fungsinya tersebut BPH Migas mempunyai tugas mengatur, menetapkan, dan mengawasi, ada tiga hal di bidang gas bumi yaitu tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa, kemudian harga gas bumi untuk rumah tangga dan usaha pelanggan kecil, serta perusahaan transmisi dan distribusi gas bumi, dan tiga hal juga di bidang BBM yaitu ketersediaan dan distribusi BBM, cadangan BBM nasional, dan pemanfaatan fasilitas pengangkutan dan penyimpanan BBM.

Bapak-Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi XII yang saya hormati,

Dalam melaksanakan tugasnya seluruh biaya operasional BPH Migas dibiayai melalui PNBP yang berasal dari iuran badan usaha. Anggaran BPH Migas tahun 2024 berdasarkan izin penggunaan PNBP dari Menteri Keuangan yaitu maksimal sebesar 24,97% dari target PNBP BPH Migas tahun 2024 sebesar Rp925,74 miliar, sehingga pagu BPH Migas tahun 2024 sebesar Rp231,15 miliar. Kemudian realisasi anggaran BPH Migas sampai dengan 15 November 2024 adalah Rp174,24 miliar atau mencapai 75,38% dari pagu tahun anggaran 2024.

Berikutnya target realisasi anggaran BPH Migas untuk tahun 2024 kami menargetkan realisasi sebesar 99% dan tadi sudah disampaikan sampai dengan 15 November realisasinya adalah sebesar 75,38%. Berikutnya untuk realisasi PNBP sampai dengan 15 November PNBP BPH Migas telah mencapai Rp5,13 triliun atau 554,68% dari target yang telah ditetapkan. Realisasi PNBP untuk masing-masing komoditas BBM dan gas bumi dan realisasi PNBP BPH Migas pada setiap tahunnya bisa kita lihat di dalam paparan tersebut dan apabila kita lihat realisasi di tahun 2024 yang luar biasa tinggi ini disebabkan adanya penerimaan piutang dari PT Kilang Pertamina Internasional untuk triwulan III 2021 sampai dengan triwulan IV 2023 sebesar 2,757 triliun dan juga *self assessment* dari PT KPI di tahun 2024 sebesar Rp1,1 triliun. Jadi ini pada saat Pertamina belum dipecah menjadi *subholding* itu kita menarik iuran dari PT Pertamina. Kemudian ketika dibagi-bagi menjadi *subholding* ada PT KPI, ada PT PPN (Pertamina Patra Niaga), kita menjadi menarik iuran dari dua-duanya *nih*. Kemudian pada saat itu PT KPI mengajukan keberatan. Tetapi hasil dari audit BPK mereka tetap harus membayar, karena sesuai aturan setiap ada penjualan harus membayar iuran. *Nah*, ini pengajuan keberatan dari PT KPI ini ditolak, sehingga akhirnya mereka membayar untuk iuran PNBP. Tetapi dengan terbitnya nanti PP 48, *sorry*, revisi dari PP 48, iuran ini hanya akan dikenakan kepada penjualan terhadap *end user*. Artinya nanti hanya akan dikenakan terhadap Pertamina Patra Niaga saja.

Kemudian berikutnya pagu anggaran BPH Migas pada tahun 2024 adalah sebesar Rp231,15 miliar, ini terdiri dari anggaran untuk publik non fisik sebesar 105,74 dan anggaran untuk pelayanan internal sebesar Rp125,40 miliar. Dan untuk rinciannya bisa kita lihat di *slide* berikutnya. Untuk kegiatan publik non fisik pada BPH Migas terbagi dalam tiga bidang yaitu bidang BBM, bidang gas bumi. dan dukungan pelaksanaan Tusi. Adapun realisasi keuangan sampai dengan 15 November per kegiatan BPH Migas sebagai berikut: yang pertama untuk bidang BBM meliputi layanan pengaturan BBM dengan pagu anggaran 79 miliar dan realisasi sebesar 75,11%; kemudian layanan pengawasan BBM anggaran 16,89 miliar dan realisasi 65,86%; kemudian layanan pemantauan cadangan dan pengelolaan informasi dengan pagu 6,85 miliar, realisasi 68%; kemudian untuk bidang gas bumi terdiri dari layanan pengaturan pemanfaatan fasilitas pengangkutan gas bumi melalui pipa, pagu anggaran 3,63 miliar, realisasi 79,18%; layanan pengaturan akun tarif dan harga gas bumi dengan pagu anggaran 5,76 miliar dengan realisasi 76,11%; layanan pengawasan dan pengelolaan informasi gas bumi dengan pagu anggaran 6,3 miliar dan realisasi keuangan 75,39.

Kemudian untuk anggaran pelaksanaan, untuk dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi meliputi layanan publik kepada badan usaha dengan pagu 6,54 miliar, realisasi 59,88%; layanan iuran anggaran 7,68, realisasi 67,72%; layanan data dan informasi anggaran 5,38 miliar dan realisasi 84,66; kemudian layanan hukum dan Humas pagu anggaran 38,77 miliar, realisasi keuangan 29,59 atau 76,31%. Selanjutnya kegiatan pelayanan internal untuk BPH Migas atau program dukungan manajemen terdiri dari gaji dan tunjangan, anggaran 37,54 miliar, realisasi 84,55%; operasional dan pembelian kantor anggaran 56,74 miliar, realisasi 72,38%; kemudian layanan manajemen SDM internal anggaran 1,10 miliar, realisasi 73,11%.

Kemudian untuk layanan dukungan manajemen internal layanan perencanaan dan penganggaran anggaran 2,23 miliar, realisasi 90,85%; layanan pemantauan dan evaluasi anggaran 3,63 miliar, realisasi 76,19%; layanan manajemen keuangan 5,05 miliar, realisasi 87,19%; layanan organisasi dan tata kelola internal anggaran 1,25 miliar, realisasi 84,57%; layanan kerumahtanggaan dan protokoler anggaran 8,37 miliar dan realisasi 91,26; kemudian layanan sarana dan prasarana internal anggaran 9,49 miliar dan realisasi keuangan 60,30%.

Bapak-Ibu Anggota Komisi XII DPR RI yang kami hormati,

Sesuai dengan tugas fungsi sebagai badan pengatur BPH Migas memiliki beberapa program yang berdampak langsung kepada masyarakat, salah satunya yaitu kegiatan yang dilakukan BPH Migas bersama-sama dengan Pimpinan dan Anggota Komisi XII DPR RI. Kegiatan ini bertujuan untuk lebih mengenalkan BPH Migas kepada masyarakat dan sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat terkait kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM maupun pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa. Secara total pagu anggaran untuk kegiatan berdampak masyarakat pada tahun 2024 sebesar 28,13 miliar dengan realisasi sebesar Rp23,59 miliar. Adapun program berdampak langsung ini meliputi pertama adalah sinergitas dan

Seminar Umum Kebijakan Hilir Migas. *Nah*, kegiatan ini adalah sosialisasi yang kita lakukan di Dapil masing-masing Anggota komisi dan ini nanti mungkin untuk yang Bapak-Ibu Anggota baru bisa dimulai di tahun 2025, karena yang 2024 ini sudah terlaksana begitu, jadi nanti ada setiap Anggota mendapatkan kesempatan. Kemudian BPH Migas *goes to campus* dengan beberapa perguruan tinggi, kami juga melaksanakan sosialisasi mengenai tugas fungsi dan juga peraturan-peraturan terbaru.

Kemudian untuk supervisi pembangunan penyalur BBM Satu Harga, *nah*, ini di tahun 2024 ada di 71 lokasi. Kemudian untuk berikutnya adalah pengawasan pelaksanaan BBM Satu Harga pada 583 lokasi penyalur, ini untuk yang sudah terbangun BBM Satu Harganya. Kemudian yang berikutnya adalah pengaturan dan penetapan harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil. Jadi di tahun 2024 ini kami sudah menetapkan di 4 lokasi di Dumai, Deli Serdang, Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan.

Kemudian ada bimbingan teknis atau *workshop* sistem instrumentasi pada fasilitas *custody transfer*. Dengan ini kita *kan* suka di-*challenge* ya. Badan usaha itu membayar iuran, kemudian apa manfaatnya bagi perusahaan. *Nah*, ini kita melakukan Bimtek-bimtek, *workshop* untuk para operator-operator dari badan usaha. *Nah*, ini salah satunya kita lakukan untuk operator gas bumi dan juga operator SPBU. Jadi yang untuk SPBU ini kita melakukan diklat dan sertifikasi operator serta pengawas SPBU. Jadi demikian, Bapak-Ibu, program-program dari BPH Migas yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Bapak-Ibu Anggota Komisi XII yang saya hormati,

Adapun capaian kinerja BPH Migas sampai dengan 15 November 2024 adalah sebagai berikut: untuk PNPB BPH Migas sebesar 5.134,93 miliar atau 554,68% dari target Rp925,74 miliar. Tadi sudah saya sampaikan bahwa angka ini sedemikian besar karena ada penerimaan piutang. Kemudian BBM Satu Harga secara kumulatif telah terbangun sampai dengan saat ini 574 penyalur dan kita punya target sampai akhir 2024 itu sebanyak 583 penyalur dan target untuk tahun 2024 sendiri yaitu 71 penyalur sudah terealisasi 62 penyalur. Jadi masih ada 9 lagi yang saat ini sedang dalam proses pembangunan, *Insyallah* nanti di bulan Desember semuanya bisa selesai.

Kemudian untuk penyaluran minyak solar sudah tersalurkan 15,42 juta KL atau 81,9% dari kuota 19 juta KL. Kemudian minyak tanah sudah tersalurkan 0,44 juta KL atau 75,49% dari kuota 0,58 juta KL. Kemudian Peralite telah tersalurkan sebanyak 26,15 juta KL atau 82,48% dari kuota 31,70 juta KL. Kemudian untuk bidang gas bumi, infrastruktur gas bumi melalui pipa tercatat sepanjang 22.520,57 Km dari target 22.500 Km terdiri dari pipa transmisi 5.370,52 Km, pipa distribusi 6.272,92 Km, dan pipa jargas 10.877,13 Km, dan pada tahun 2024 penambahannya adalah sepanjang 41,95 Km. Kemudian untuk volume pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa sebesar 1,21 miliar MSCF atau 81,31% dari target 1,49 MSCF yang merupakan realisasi sampai dengan triwulan III tahun 2024.

Bapak-Ibu, Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI yang saya hormati,

f

Berikutnya adalah untuk tahun 2025. Pagu alokasi anggaran BPH Migas pada tahun 2025 adalah sebesar Rp254,29 miliar. Pagu ini naik sebesar 10,01% dari pagu anggaran 2024 yang ditetapkan sebesar Rp231,15 miliar. Kenaikan pagu ini diantaranya karena adanya peningkatan belanja pegawai dengan adanya penambahan CPNS dan juga PPPK. Kemudian belanja modal untuk renovasi aset sentral dan pengadaan *building automatic system* serta belanja sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Kemudian sesuai dengan Tusi BPH Migas, kami sampaikan program strategis dan target kinerja utama untuk tahun 2025. Untuk supervisi progres pembangunan penyalur BBM Satu Harga pada tahun 2025 ditargetkan untuk 71 lembaga penyalur. Kemudian pengawasan operasional BBM Satu Harga pada tahun 2025 ditargetkan untuk 142 penyalur BBM Satu Harga yang telah terbangun. Kemudian persentase penyaluran JBT dan JBKP yang ditugaskan kepada badan usaha targetnya masing-masing 100%.

Kemudian untuk bidang gas bumi, layanan dukungan percepatan pembangunan ruas pipa transmisi dan distribusi melalui pipa pada tahun 2025 ditargetkan pembangunan sepanjang 50 Km, sehingga target kumulatif panjang pipa adalah 22.550 Km. Kemudian volume pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa targetnya 1,49 miliar MSCF, sedangkan untuk sekretariat target PNBPH BPH Migas adalah sebesar Rp1018,41 miliar.

Berikutnya sejalan dengan semangat untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, pada tahun 2025 BPH Migas telah mengalokasikan sebesar Rp30,4 miliar untuk kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat yang terdiri dari sinergi BPH Migas dengan *stakeholder* dengan anggaran 12,72 miliar, kemudian Seminar Umum Kebijakan Hilir Migas dengan anggaran 5,63 miliar, BPH Migas *goes to campus* dengan alokasi anggaran 1,09 miliar, supervisi progres pembangunan penyalur BBM Satu Harga anggaran 2,5 miliar, kemudian pengawasan pelaksanaan BBM Satu Harga anggaran Rp4,09 miliar, kemudian pengaturan dan penetapan harga gas bumi untuk rumah tangga anggaran Rp2,20 miliar, layanan umum masyarakat untuk diklat dan sertifikasi operasi SPBU jenjang pengawas dengan alokasi anggaran 1,04 miliar, kemudian bimbingan teknis atau *workshop* untuk operator gas bumi sistem instrumentasi pada fasilitas *custody transfer* dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,09 miliar.

Bapak-Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi XII yang saya hormati.

Demikian paparan kami yang terkait dengan progres dan evaluasi pelaksanaan program hingga triwulan III tahun 2024 dan juga program strategis tahun 2025.

Selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan.

WAKIL KETUA KOMISI XII (PUTRI ZULKIFLI HASAN, S.Mn., M.Bus./F-PAN):

f

Baik, Ibu, terima kasih atas pemaparan dan penjelasan yang telah diberikan.

Sebelum saya mempersilakan kepada Anggota untuk melakukan pendalaman, tadi ada beberapa yang baru hadir dan belum berkenalan, mungkin kita persilakan. Ada Pak Mukhtarudin dari Golkar. Silakan, Pak.

F-P.GOLKAR (Drs. MUKHTARUDIN):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Izin memperkenalkan diri Kembali, Bu. Mukhtarudin dari Dapil Kalimantan Tengah, Fraksi Partai Golkar.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI XII (PUTRI ZULKIFLI HASAN, S.Mn., M.Bus./F-PAN):

Selanjutnya dari Gerindra, dari Fraksi Gerindra, Pak Rocky.

F-P.GERINDRA (ROCKY CHANDRA):

Ya, terima kasih.

Izin memperkenalkan, Pimpinan, Ibu Kepala BPH Migas beserta jajaran. Saya Rocky Chandra, Bu, dari Fraksi Partai Gerindra Dapil Jambi, Bu.

Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI XII (PUTRI ZULKIFLI HASAN, S.Mn., M.Bus./F-PAN):

Baik, selanjutnya dari PKS. Pak Haris, silakan.

F-PKS (Dr. H. MUH. HARIS, S.S., M.Si.):

Terima kasih, Pimpinan.

Ibu dan seluruh jajaran para Anggota semuanya,

Izin, saya Muhammad Haris, daerah pemilihan Jawa Tengah I, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang dan Kendal, dari Fraksi PKS.

Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI XII (PUTRI ZULKIFLI HASAN, S.Mn., M.Bus./F-PAN):

Selanjutnya Fraksi PAN, Pak Aqib.

F-PAN (AQIB ARDIANSYAH, M.Si.):

f

Siap. Terima kasih, Pimpinan,

Izin perkenalkan, Kepala BPH Migas dan jajarannya, saya Aqib Ardiansyah, Fraksi PAN, Dapil Jateng VII, Purbalingga, Kebumen, Banjarnegara. Kemarin saya, kalau periode yang lalu saya duduknya di belakang, Pak, tenaga ahli teman-teman itu. *Nah*, sekarang kebetulan kemarin ikut *tarung*, Pak, diberi kesempatan sama yang di atas *alhamdulillah* bisa bergabung dengan teman-teman di Komisi XII.

Terima kasih, Ibu-Bapak dan jajaran BPH Migas, semoga kita bisa bersinergi, Terima kasih, Pak.

WAKIL KETUA KOMISI XII (PUTRI ZULKIFLI HASAN, S.Mn., M.Bus./F-PAN):

Baik. Dari Fraksi Nasdem, Pak Gulam.

F-P.NASDEM (GULAM MOHAMAD SHARON):

Terima kasih.

Perkenalkan saya Gulam Muhammad Sharon dari Dapil II Kalimantan Barat.

Terima kasih, semoga nanti BPH dengan kita bisa bersinergi dengan baik. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI XII (PUTRI ZULKIFLI HASAN, S.Mn., M.Bus./F-PAN):

Satu lagi ya, ada Bang Ramson. Silakan perkenalkan diri, Bang.

F-P.GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Terima kasih, Ibu Ketua Rapat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Saya memperkenalkan diri, yang terhormat Ibu Kepala BPH Migas dan semua jajarannya. Nama saya Ramson Siagian, kalau di Dapil dipanggil Bung Ramson, Bu. Dapil Jawa Tengah X, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Fraksi Partai Gerindra, nomor A-116. Itu *aja* ya.

Jadi terima kasih selama ini BPH Migas ini cukup bagus ini kerja sama di Dapil. Salam juga dari masyarakat, khususnya Kabupaten Pekalongan sama Kabupaten Pemalang, katanya ingin ada sosialisasi lagi dari BPH Migas. Apakah tahun ini masih ada? Itu, Bu Ketua. Soalnya senang itu rakyat kalau disosialisasi, jadi tambah pengetahuan praktisnya.

*Makasih, Bu Ketua.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

WAKIL KETUA KOMISI XII (PUTRI ZULKIFLI HASAN, S.Mn., M.Bus./F-PAN):

Baik, terima kasih.

Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak-Ibu Anggota Komisi XII DPR RI untuk melakukan pendalaman dengan memberikan tanggapan, pernyataan maupun pertanyaan yang akan kita mulai dari Fraksi PDI Perjuangan. Silakan.

F-PDI PERJUANGAN (SHANTY ALDA NATHALIA, S.H.)

Terima kasih, Pimpinan.

Bapak-Ibu dari BPH Migas,

Mungkin sederhana *aja* pertanyaan dari saya, tapi saya rasa sangat penting karena lumayan mendapat sorotan publik. Yang pertama yang saya ingin tanyakan, hari ini masih banyak persoalan tentang subsidi BBM itu diperbincangkan di mana-mana. Wacana yang paling sering muncul itu adalah pengalihan subsidi BBM menjadi Bantuan Langsung Tunai atau BLT. Saya pikir dalam hal ini, untuk hal ini ya pemerintah harus hati hati. Pertama, subsidi itu adalah amanat undang-undang. Dalam Undang-Undang APBN di situ disebutkan bahwa program pengelolaan subsidi dilaksanakan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Artinya istilah subsidi itu ada.

Namun yang jadi persoalan adalah pelaksanaannya, apakah subsidi kita itu sudah tepat sasaran? Saya rasa kita, pemerintah harus fokus dulu ke situ, apakah subsidi kita ini sudah tepat sasaran. Kita jangan ke mana-mana dulu, apalagi mengganti subsidi BBM dengan BLT. Hari ini masyarakat itu masih banyak melihat saya rasa ya, Bapak-Ibu semua. Kita tahu semua, masyarakat masih banyak melihat itu mobil-mobil yang terhitung mewah masih mendapatkan subsidi. Bapak-Ibu, mungkin data dari mana ya? Silakan Bapak-Ibu dari BPH Migas mencari sendiri di *Youtube*. Itu ketik *aja* itu "mobil mewah mengisi", "mobil mewah dengan Peralite", "mobil mewah dengan solar mengisi bahan bakar dengan solar". *Nah*, saya rasa itu adalah persoalan yang harus kita fokus, persoalan aspirasi masyarakat yang sekarang ini sedang marak. Ini saya mohon Bapak-Ibu BPH Migas bisa bijak ya melihat persoalan yang ada dulu. Kita fokus dulu di situ, itu dari saya.

Jadi tolong sekali lagi dievaluasi Kembali, terutama saya juga mau lihat apa upaya yang dilakukan BPH Migas untuk memperketat pengawasan di dalam distribusi penyaluran BBM itu, sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Karena banyak sekali penyimpangan yang saya lihat. Bulan lalu itu di Maluku ada penimbunan. Penimbunan BBM itu sampai 3,4 juta ton, bayangkan, dan itu sudah dibongkar oleh kepolisian di Maluku. Banyak lagi, Pak, saya *nggak* bisa sebut satu-satu di sini. Mungkin di Banda Aceh juga ada, Situbondo, itu banyak di mana-mana. Di mana ini pengawasannya? Kita *nggak*

usah bicara BBM Satu Harga, ini dulu yang kita *beresin*, dan kita jangan loncat-loncat ke mana-mana dulu.

Mungkin itu, demikian dari saya.

Terima kasih, Pimpinan. Mohon ditanggapi dari BPH Migas.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI XII (PUTRI ZULKIFLI HASAN, S.Mn., M.Bus./F-PAN):

Waalaikumsalam.

Baik, selanjutnya dari Fraksi Partai Golkar. Bu Dewi, silakan.

F-P.DEMOKRAT (Ir. H. MULYADI):

Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI XII (PUTRI ZULKIFLI HASAN, S.Mn., M.Bus./F-PAN):

Dari Golkar dulu, Pak Mul, biasa, kita urut ya, mohon izin.

Silakan, Bu Dewi.

F-P.GOLKAR (DEWI YUSTISIANA, S.H., M.Kn.):

Terima kasih, Pimpinan.

Kami dari Partai Golkar ingin menyampaikan bahwa sebetulnya kita sangat mendukung bagaimana supaya program penyaluran BBM dan gas bersubsidi ini bisa tersampaikan secara tepat guna dan tepat sasaran. dari pemberitaan di media tentunya menteri ESDM sendiri menyatakan ada potensi bahwa penyalahgunaan BBM itu sampai mencapai nilai 100 T ya, Bu. Kalau saya, dan kemarin kami baru saja melakukan RDP dengan Dirut Patra Niaga di mana salah satu *concern* yang disampaikan adalah ternyata kriteria penerima subsidi BBM terutama itu tidak jelas. Karena kami juga kemarin menanyakan hal yang sama, kenapa dari tahun ke tahun itu subsidi BBM itu tidak bisa dilakukan secara tepat guna dan tepat sasaran.

Nah, dari hasil RDP itu kami mendapatkan penjelasan bahwa belum ada kriteria yang jelas siapa saja yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi ini, sehingga pada materi yang dipaparkan oleh Patra Niaga kemarin salah satunya mereka mengusulkan adanya revisi Perpres 191 Tahun 2014 untuk BBM subsidi dan revisi Perpres Nomor 104 Tahun 2007 untuk elpiji subsidi dengan pertimbangan sehingga ada perubahan yang bisa merumuskan dan memberikan kriteria secara jelas siapa yang berhak menjadi penerima dan pengguna BBM dan elpiji subsidi ini, itu satu. Dan saya juga melihat *kan* fungsi dari BPH Migas itu sendiri tadi Ibu sudah jelaskan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi ya, Bu.

Nah, kalau kita tidak punya kriteria dan payung hukum yang mengatur kriteria penerima BBM bersubsidi itu secara jelas, saya agak bingung bagaimana BPH Migas bisa melakukan pengawasannya secara efektif dan efisien dan tepat guna.

Kemudian saya juga lihat di sini di materi yang Ibu sampaikan di halaman 22, Ibu tidak melihat dinamika bahwa BBM bersubsidi ini belum bisa disalurkan secara tepat guna dan tepat sasaran itu sebagai suatu kendala atau *concern* yang harus diperbaiki dari sisi payung hukumnya, karena di dalam program yang disampaikan kepada kami untuk tahun 2025 saya tidak melihat akan ada perubahan atau revisi terhadap peraturan terkait. Dan memang kalau kita hanya melihat dari sisi indikator penerimaan negara bukan pajak bisa dilihat dari target realisasinya sangat jauh melampaui. Tapi masalahnya adalah dari angka ini ternyata dan bisa jadi tadi juga sudah disampaikan oleh rekan kami dari PDIP, angka yang besar ini bisa jadi yang menyetorkan PNPB ini bukan dari orang yang menerima, Bu, yang berhak menerima seperti itu. Nanti mungkin dari BPH Migas bisa ditanggapi.

Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI XII (PUTRI ZULKIFLI HASAN, S.Mn., M.Bus./F-PAN):

Oke, kita lanjutkan ke Fraksi Partai Gerindra.

F-P.GERINDRA (H. ROKHMAT ARDIYAN, M.M.):

Baik. Terima kasih, Pimpinan.

Ibu Kepala Komite yang kami hormati beserta jajaran,

Pertama kami menanyakan kendala-kendala apa yang dihadapi oleh BPH Migas dengan luas wilayah yang meliputi NKRI yang begitu luasnya dengan anggaran yang terbatas, dengan sumber daya yang terbatas. Kami siap untuk membantu memfasilitasi agar BPH Migas ini bisa mengoptimalkan peran organisasi ini bekerja secara efektif dan efisien. Karena fungsi pengawasan ini supaya bisa berjalan dengan baik, barang yang disalurkan subsidi ini nilainya ratusan triliun lebih.

Yang berikutnya apakah ada fungsi khusus pengawasan setingkat Eselon II? Kalau tidak, bagaimana supaya organisasi ini bisa berjalan dengan pengawasan yang baik, Bu? Di Dapil kami, Dapil Kuningan, Ciamis, Banjar, Pangandaran itu nelayan kami cukup banyak, Pak, khususnya di Pangandaran dan beberapa kali kami menemukan ada SPBU yang solarnya masih kosong dan saya minta *roadmap* sistem distribusi BBM subsidi sampai ke nelayan seperti apa, sehingga kendala-kendala ini saya minta kepada BPH Migas untuk merespon dengan cepat kendala-kendala yang dihadapi oleh para nelayan, sehingga kami mengharapkan pemerintah Bapak Presiden bahwa kehadiran kita semua untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar tercapainya pertumbuhan ekonomi 8%. *Nah*, BPH Migas bersama-sama kami untuk

mengatasi kesulitan-kesulitan di masyarakat. Demikian, Ibu. Kemudian mengenai reformasi subsidi agar lebih tepat sasaran, itu *aja*.

Demikian dari kami, terima kasih. Semoga sinergi ini dan harmonisasi ini terus berjalan untuk saling menguatkan.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI XII (PUTRI ZULKIFLI HASAN, S.Mn., M.Bus./F-PAN):

Kita lanjutkan kembali Fraksi Partai Nasdem.

F-P.NASDEM (IRSAN SOSIAWAN, M.B.A.):

Saya sedikit ya, saya tambah ini.

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kepada Kepala Komite, Kepala BPH Migas,

Dari saya hanya menanyakan perihal pengawasan distribusi BBM terutama ke daerah-daerah yang mana yang saya alami, yang saya lihat keluhan-keluhan masyarakat di wilayah Aceh, kebetulan saya dari Dapil Aceh, Ibu Kepala, Ketua Komite, Kepala BPH Migas, yang saya melihat kondisi saat ini harga pasaran untuk subsidi bahan bakar Migas itu BBM kalau tidak salah saya itu kurang lebih sekitar 6.800 ya, Bu, per liter. Antara industri dengan BBM subsidi itu sangat jauh. Industri itu kalau tidak salah sekitar 20 ribu per liter, betul ya, Bu?

Nah, hal ini sangat selalu dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mengambil kesempatan di setiap, bahkan di SPBU maupun di transportir BBM tersebut. Ini sering terjadi, Bu, dan hal ini juga banyak penimbunan. Lalu mereka nanti para oknum itu juga akan memperdagangkan kembali kepada *illegal-illegal mining* untuk diperjualbelikan lagi hasil dari bahan bakar industri subsidi ini, Ibu. Jadi sebagai masukan saja, yang dialami saat ini di daerah banyak begitu, Bu. Jadi mohon dari saya agar dapat dijelaskan nanti bagaimana fungsi pengawasan dari BPH Migas ini untuk pendistribusian BBM, terutama BBM subsidi yang selalu dampaknya tidak tepat sasaran, yang diterima itu pada orang-orang yang memang berkemampuan, bukan yang memang masyarakat yang sangat membutuhkan. Karena di wilayah Dapil saya ini, Bu, hampir setiap hari, malam-malam hari terutama, itu antrian mungkin bisa dikatakan sampai 1 Km hanya untuk mengantri di SPBU. Dan mobil-mobil tersebut bisa dikatakan mobil-mobil yang kategori sekitar Kijang Innova dan segalanya dan menurut saya itu tidak masuk akal, karena mereka akan mengambil BBM subsidi itu untuk dijualbelikan kembali. Hal-hal inilah mungkin dari saya mungkin sebagai suatu perhatian dan fungsi pengawasan dari BPH Migas perlu diperhatikan. Itu saja, Ibu.

Terima kasih, Ibu Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI XII (PUTRI ZULKIFLI HASAN, S.Mn., M.Bus./F-PAN):

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selanjutnya dari Fraksi PKB.

F-PKB (N.M DIPO NUSANTARA P.U., S.H., M.Kn.):

Terima kasih, Ketua.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat Ibu Kepala Migas beserta jajarannya,

Ini seperti keluhan teman-teman, Bu, *nggak* beda jauh. Kalau kita lihat fungsi dan tugas BPH Migas ini berdasarkan Undang-Undang 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, di sini Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) sama-sama bilang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa. Yang ayat (2)-nya melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak dan gas bumi yang ditetapkan pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah NKRI serta meningkatkan pemanfaatan gas bumi dalam negeri. Yang saya mau tanyakan di sini, Bu, di sini dasar pembagian kuota per daerah ini berdasarkan apa? Karena terus terang, Bu, di daerah NTT, terutama di daratan Flores ya, Bu, di Dapil saya itu orang antre itu mulai pagi, Bu.

Mobil angkut semua mulai pagi, *nggak* sampai jam 10.00 sudah habis lagi. Itu yang sampai sekarang saya sendiri juga bingung, masalah ini *udah* apa ya, masalah BBM langka ini sudah lama daerah, tapi *nggak* ada perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Terutama kita tahu NTT itu salah satu masuk daerah untuk pariwisata premium, itu yang kita butuh atensi dari Ibu, terutama nanti saya pasti hubungi seperti yang Ibu katakan tadi koordinatornya Pak Saleh Abdurrahman, iya *kan*, karena membawahi wilayah Nusa Tenggara Timur juga, termasuk nanti ada wakil koordinatornya, Pak Wahyudi Anas. Karena terus terang, Bu, yang disorot di sana itu Labuan Bajo, itu Labuan Bajo itu *nggak* sampai jam 10.00 bahan sudah habis.

Apalagi di daerah Ende, di Alor, di Manggarai, rata-rata semua orang mengeluhkan hal yang sama. Apalagi kemarin yang sangat viral itu masalah BBM yang ketahuan sampai akhirnya dibawa ke Komisi III, ada keterlibatan aparat penegak hukum. *Nah*, itu kita butuh kerja sama Ibu nanti, terutama di Dapil-dapil yang sudah menjadi rahasia umum, bahwa ada kelangkaan-kelangkaan yang melibatkan HPH-HPH tertentu. Di sini kita bisa kerja sama, Ibu, mungkin Ibu nanti masalahnya di mana. Karena itu Dapil saya, saya juga dulu di Komisi III, kita bisa kerja sama. Mungkin masalah apa yang bisa kita bantu supaya sama-sama bahwa itu hak masyarakat, jadi masyarakat yang

mencicipi, bukan orang-orang tertentu. Karena terus terang ada orang-orang tertentu yang gampang mendapatkan BBM itu, tapi masyarakat kecil menengah dan masyarakat biasa sangat susah mendapatkan BBM itu.

Terima kasih, Ketua, dari saya itu dulu.

Walaikumsalam warahmatullah wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI XII (PUTRI ZULKIFLI HASAN, S.Mn., M.Bus./F-PAN):

Terima kasih.

Kita lanjut ke Fraksi PKS.

F-PKS (NEVI ZUAIRINA):

Terima kasih, Pimpinan.

**Anggota Komisi XII yang kami hormati,
BPH Migas bersama jajaran,
Bapak-Ibu semua,**

Untuk masalah pengawasan tadi sudah disampaikan banyak oleh teman-teman. Tapi kalau kita lihat di lapangan tidak hanya masalah tepat sasaran dan sebagainya, tapi ada beberapa kasus yang perlu kita perhatikan, yang viral baru-baru ini di sebuah SPBU di Yogyakarta ditutup karena berbuat curang dengan cara memasang alat tambahan yang dapat mempengaruhi jumlah BBM yang dituangkan ke tangki kendaraan, termasuk juga kejadian BBM Pertalite dicampur dengan air di sebuah SPBU Bekasi beberapa waktu yang lalu. Kejadian ini banyak sekali ya di seluruh wilayah Indonesia dan tentu sangat merugikan masyarakat, sehingga harus ditindak tegas. *Nah*, bagaimana posisi BPH Migas dalam kasus-kasus yang seperti ini (tidak tepat sasaran, pemasalahan yang begitu banyak)? Dan langkah apa BPH Migas agar ini tidak terjadi di kemudian hari?

Lalu yang kedua, pencapaian target volume kuota BBM subsidi nelayan tahun 2023 hanya sebesar 69% untuk sektor nelayan yang disalurkan melalui SPBU nelayan dan SPBB nelayan. *Nah*, faktor apa yang menyebabkan rencana rendahnya penyampaian ini? Bagaimana juga pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengalokasian penyaluran BBM subsidi untuk saat ini? Jangan-jangan kita berikan kepada mereka SPBU nelayan tapi digunakan oleh orang-orang yang tidak tepat sasaran. *Nah*, ini kita juga ingin dengar laporannya.

Lalu yang ketiga, salah satu kendala dalam percepatan pembangunan ruas pipa transmisi dan distribusi gas bumi adalah sulitnya mendapatkan data kebutuhan pemanfaatan gas bumi, sehingga badan usaha tidak memiliki rencana pengembangan jaringan pipa. Apakah sudah ada upaya dari BPH Migas melakukan penyelesaian kendala ini di tahun 2024? Bagaimana bentuknya? Apakah BPH Migas pernah melakukan koordinasi dengan

Kementerian Perindustrian untuk menentukan data kebutuhan atau *demand* pemanfaatan gas bumi? Karena industri terutama memiliki struktur biaya produksi yang didominasi oleh bahan bakar, terutama gas, selama ini membutuhkan adanya pembangunan jaringan gas agar dapat mengurangi biaya dari bahan bakar tersebut.

Lalu selanjutnya, Bapak-Ibu semua, tadi sudah disampaikan tingginya hasil PNBK 2024 BPH Migas disumbang dari penerimaan piutang PT Kilang Pertamina Indonesia dengan nilai total hampir 4 triliun. Apakah bisa dijelaskan secara mendalam terkait dengan hutang piutang tersebut?

Lalu selanjutnya program BPH Migas *goes to campus*, ternyata hanya 3 kampus, Bapak-Ibu semua (UNNES Semarang, Univ. Pertiba Bangka, dan UGM) dengan anggaran 1,3 miliar. Kenapa hanya sedikit kampus yang dilibatkan? Kita ingin di daerah-daerah kita juga ada seperti ini, Pak, acaranya dan inikan termasuk juga untuk kita sosialisasi ya tentang BPH Migas, apakah tidak bisa dilakukan di banyak lokasi agar keberadaan BPH Migas bisa dirasakan oleh mahasiswa dan civitas akademika di seluruh Indonesia.

Lalu, Pak, terkait capaian kinerja, khususnya volume pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa yang sangat kecil sekitar 50%, bisa dijelaskan penyebabnya dan solusinya bagaimana agar target tersebut bisa terpenuhi?

Terima kasih, Pimpinan, itu saja.

WAKIL KETUA KOMISI XII (PUTRI ZULKIFLI HASAN, S.Mn., M.Bus./F-PAN):

Baik, kita lanjut Fraksi PAN.

F-PAN (AQIB ARDIANSYAH, M.Si.):

Terima kasih, Ketua.

Saya yang lain sudah hampir sama dengan pertanyaan yang teman-teman sampaikan, Ibu Kepala BPH. Tapi saya coba ingin mengkritisi yang halaman 12 saja itu, Bu, saya ingin dapat pendalaman. Yang pertama adalah saya minta dijelaskan apakah piutang yang ke Kilang Pertamina Internasional pada tahun 2021 itu ada kaitannya *nggak* ya dengan covid atau faktor-faktor lain apa *gitu*, Bu? Mohon bisa dijelaskan.

Yang kedua, *self assessment* KPI itu apakah sudah diaudit secara independen, Bu?

Tambahannya yang terakhir, yang piutang, apakah piutang ini sudah memperhitungkan *interest rate* selama periode 2021 sampai 2024 itu ya? Coba, mohon dijelaskan ya.

Terima kasih, Ketua.

WAKIL KETUA KOMISI XII (PUTRI ZULKIFLI HASAN, S.Mn., M.Bus./F-PAN):

f

Baik, selanjutnya untuk Fraksi Partai Demokrat dipersilakan.

F-P.DEMOKRAT (Ir. H. MULYADI):

Terima kasih, Pimpinan.

**Seluruh Anggota Komisi XII yang saya hormati,
Kepala dan Anggota BPH Migas,**

Kalau saya lihat di sini BPH Migas inikan fungsi utamanya adalah melakukan pengawasan. Tapi saya tidak melihat dari tadi Ibu menyampaikan temuan-temuan Ibu terkait pengawasan selama ini apa yang sudah terjadi. *Kan* banyak sekali itu di tengah-tengah masyarakat penyimpangan-penyimpangan. BPH Migas sebagai yang bertanggung jawab melakukan fungsi pengawasan di seluruh Indonesia, apa yang sudah ditemukan dari fungsi yang dimiliki oleh BPH Migas? Saya lihat dari tadi paparannya *nggak* ada, *nggak* ada yang menyangkut temuan-temuan BPH Migas. Kita jangan sampai BPH Migas ini macan *ompong*, Bu, fungsinya luar biasa, tapi tindakan-tindakannya saya tidak terdengar, Pak. Tolong dipublikasikan, Pak.

Jadi teori untuk menertibkan itu, Pak, orang harus tahu bahwa yang punya fungsi itu melaksanakan fungsinya, menindak *gitu*, dan itu dipublikasikan agar yang lain itu takut dia berbuat karena BPH Migas sudah melakukan tindakan-tindakan yang tegas terhadap pelanggar-pelanggar, penyimpangan-penyimpangan. Jadi bagi saya pada paparan hari ini yang paling utama bagi saya sejauh mana BPH Migas itu melaksanakan fungsinya? Di mana saja yang sudah mereka lakukan itu penindakan-penindakan sanksi dan lain sebagainya di Indonesia? Kalau urusan anggaran itu gampang *lah*, Pak, tinggal kita baca *aja* kalau urusan-urusan anggaran. Tapi terkait fungsinya, seperti yang disampaikan di Undang-Undang 22/2001 ini melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa.

Mungkin kalau pengangkutan melalui pipa inikan lebih *gampang* ya mengawasinya. Mungkin pendistribusian BBM sudah menjadi isu yang tidak selesai-selesai sejak saya di sini, Pak Tiko. Saya kenal Pak Tiko ini, karena sering ke Sumbar saya lihat. Tapi saya lihat di sini pun penanggung jawab Sumbarnya ini Pak siapa *nih*? Pak Harya. Mana Pak Harya? Yang mana Pak Harya, Pak? Harya Adityawarman. Izin? *Oh* iya. Jadi saya lihat yang penanggung jawab di Dapil saya itu Pak Harya. Saya mohon kalau *nggak* bisa minggu ini minggu depan kita bersama-sama di Sumbar melakukan fungsi pengawasan. Coba dipanggil seluruh SPBU itu, kumpulkan, berikan arahan sekaligus sanksi apa yang bisa mereka dapat, apa mereka melanggar hal-hal tersebut. *Kan* ini SPBU itu malam-malam ada orang datang pakai *pick up* bawa jerigen, bawa apa. Kalau persoalan BBM subsidi di daerah saya *nggak* pakai *barcode* juga orang mobil-mobil biasa juga bisa beli. Jadi kalau teori *barcode tuh* menurut saya *sih* mungkin di Jakarta *kali* ya. Di daerah-daerah itu *nggak* pakai *barcode* juga orang bisa beli BBM subsidi mobil-mobil yang seharusnya *nggak* boleh.

Jadi saya lebih *concern*, Bu Kepala, fungsi pengawasan ini agar memberi dampak efek jera. Jadi harus ada efek jeranya. Kalau *nggak* ada efek jeranya orang akan melanggar terus, Bu, teorinya begitu. Yang namanya orang dagang *kan* dia pasti bermain *lah*, pasti *bermain*. Apalagi yang namanya subsidi itu desperitasnya *kan* jauh sekali. Kebanyakan dia jual ke industri BBM illegal. Di sini salah satu fungsinya BPH Migas adalah fasilitas pengangkutan dan penyimpanan BBM. Bagaimana fasilitas penyimpanan kita, sudah cukup? Kemudian fasilitas pengangkutan? Apalagi keluhan-keluhan saya dengar dari SPBU itu adalah *kencing* di jalan, sehingga berkurang minyak yang sampai ke SPBU.

Kalau bicara cadangan BBM, kita masih cadangan operasional ya, Pak? Iya, Bu? Masih jauh dari cadangan strategis. Jadi memang bagaimana strategi kita dalam rangka meningkatkan cadangan ini. Kalau *nggak* ada tempat penyimpanannya tentu sulit juga. Kebijakannya berarti di BPH ini ya, Bu, untuk memperbanyak *storage* BBM ini di BPH ya? Pertamina pelaksana saja? Interaktif sebentar. Artinya kalau diperintahkan oleh BPH, Pertamina *kan* harus membuat baik itu Pertamina sendiri atau mereka kerja sama dengan swasta.

KEPALA BPH MIGAS:

Jadi kalau dari kami itu, Pak, melakukan pemantauan minimal cadangan yang harus dipunyai oleh badan usaha. Tetapi untuk izin penyimpanannya sendiri *kan* ada Ditjen Migas, Pak, untuk pendirian *storage*, izin usahanya, seperti itu ada di Ditjen Migas, Pak.

F-P.DEMOKRAT (Ir. H. MULYADI):

Nggak, maksud saya begini, kalau kita ingin meningkatkan cadangan BBM tentu ditingkatkan juga penyimpanannya, *kan* begitu teorinya. *Kan nggak* mungkin kita meningkatkan cadangan tapi tempat *nyimpannya aja nggak* ada. *Kan* BPH itu punya kewenangan memerintahkan Pertamina menambah tempat penyimpanan. Kalau Pertamina tidak punya uang *kan* dia bisa bekerja sama dengan swasta. Betul begitu?

KEPALA BPH MIGAS:

Ya, jadi kita menetapkan jumlah hari yang mereka harus punya stoknya. Otomatis kalau.

F-P.DEMOKRAT (Ir. H. MULYADI):

Kalau cadangan operasionalnya Ibu tambah misalnya 5 hari lagi *kan* mereka harus menambah *storage*-nya, betul *kan*? Kebijakan itu ada di BPH *kan*?

KEPALA BPH MIGAS:

Penetapan jumlah harinya iya.

f

F-P.DEMOKRAT (Ir. H. MULYADI):

Iya, betul, penetapan jumlah harinya BPH, kemudian konsekuensinya Pertamina harus menyiapkan. Kita masih bicara cadangan operasional. Kalau negara lain *kan* sudah cadangan strategis. Sementara Pak Presiden kita mengatakan kita harus punya ketahanan energi, apalagi kalau sampai terjadi perang. Bagaimana kita bisa berperang kalau bahan bakar kita *nggak* ada. Dari mana kita kalau cadangan hanya cadangan operasional, sementara negara lain memiliki cadangan strategis sampai satu bulan, dua bulan, *gitu* ya, sehingga mereka dalam keadaan darurat masih mampu bertahan. *Nah*, ini yang saya tangkap salah satu yang disampaikan oleh presiden kalau pada saat perang itu negara lain sibuk dengan kepentingan mereka sendiri.

Jadi saya sekali lagi ingin kita sama-sama, Bu, melakukan fungsi pengawasan. Nanti saya minta Pak siapa yang Sumbar. Karena kebetulan saya lihat yang bertanggung jawab di Dapil saya Pak Harya ya. Silakan teman-teman juga mencatat yang penanggung jawab di Dapilnya, ini penting ini. Kita bisa melakukan fungsi pengawasan bersama dengan BPH, Pak Alfon, supaya nanti apa yang terjadi di daerah kita itu betul-betul kita pastikan dapat terjadi pengurangan *lah*. Kalau *nggak* bisa hilang terjadi pengurangan, penyelundupan BBM kepada pihak-pihak yang tidak berhak, itu kan sudah sudah modus yang sudah rahasia umum, *udah* modus rahasia umum itu, Bu, kadang-kadang di-*back up* oleh aparat. Maka dari itu ya kita, saya dulu kebetulan dari Komisi III ya kita lapor Kapolri.

Saya setiap saat bisa WA Kapolri sampai saat ini, kalau ada aparat kepolisian yang terlibat di sana langsung kita lapor dan Pak Kapolri bilang sama saya, "Kalau ada, Pak Mulyadi, langsung WA saya, saya ambil tindakan." Jadi mohon kiranya pada kesempatan ini kita mengoptimalkan fungsi pengawasan agar seperti yang disampaikan oleh Bu Shanti tadi, BBM yang disubsidi oleh negara ini betul-betul sampai kepada yang berhak. *Kan* tujuannya ke masyarakat yang berhak, bukan masyarakat yang sudah mampu atau kaya *gitu*.

Yang pertanyaan berikutnya, Bu, yang BBM Satu Harga ini memang masih jalan, Bu? Memang masih satu harga itu? *Kok* kemarin Pak Gunhar, Pak Gunhar bilang, "Itu *udah* *nggak* jalan itu satu harga itu", kata Pak Gunhar. Masih jalan di provinsi-provinsi yang ditulis tadi ya? Silakan teman-teman yang Dapilnya di sana melakukan pengecekan apakah betul satu harga sama dengan di Jakarta, harga Pertalite, harga BBM yang lainnya, apakah memang sama dengan daerah tersebut. Karena konsep ini sudah sejak zaman saya dulu, zaman 2014 dulu *kan* kita canangkan dan itu memang besar sekali Pertamina mensubsidi itu. Karena *kan* transportnya *kan* berbeda, sehingga BBM-nya *dibikin* satu harga memang besar operasional yang harus ditanggung oleh Pertamina.

Jadi itu yang paling penting. Saya nanti hubungi, nanti kalau *nggak* minggu ini minggu depan, nanti kita lakukanlah fungsi pengawasan. Kebetulan selain saya ada Bu Nevi *nih* satu Sapil sama saya. Nanti, Bu Nevi, saya atur

nanti dengan BPH, Bu, kita lakukan fungsi pengawasan Bersama-sama di Dapil kita untuk memastikan apa yang terjadi selama ini sepertinya orang tutup mata, Bu. Sepertinya itu fungsi pengawasan itu sangat lemah *gitu*, terutama penyelewengan BBM-BBM yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Siapapun yang *backup* kita tindak, itu prinsip kita pada kesempatan hari ini Kalau ada aparat ya kita koordinasikan, kalau polisi dengan Kapolri, kalau tentara dengan Panglima. Jadi *nggak* ada lagi ruang bagi siapapun yang coba-coba menyelewengkan barang subsidi ini untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok yang memang mereka merupakan kelompok yang tidak berhak menerima subsidi.

Saya rasa itu, Bu, yang menjadi penekanan saya. Mudah-mudahan saya berharap BPH Migas ke depan ini semakin mampu melakukan fungsi pengawasannya, walaupun jumlah personilnya saya lihat cuma sedikit sekali ya, Bu. Melakukan pengawasan itu di seluruh Indonesia ya, Bu?

KEPALA BPH MIGAS:

Iya, tapi hanya ada di Jakarta.

F-P.DEMOKRAT (Ir. H. MULYADI):

Terus bagaimana mengawasi yang di provinsi itu, polanya bagaimana itu, Bu? Saya agak bingung juga, BPH inikan punya, bertanggung jawab, apalagi ke presiden melalui menteri, melakukan pengawasan, pendistribusian BBM, penyediaan BBM di seluruh Indonesia. Bagaimana itu kira-kira strategi Ibu *gitu* dengan personil yang hanya ada dua ratus orang ini bisa melaksanakan fungsinya? Karena fungsinya luar biasa *nih*, Bu. Kalau saya lihat fungsi inikan terkait dengan kewenangan, sangat luar biasa. Tapi jangan hanya fungsi dan kewenangan itu cuma di atas kertas, Bu, di lapangan tidak tercermin sama sekali. Ini yang saya ingin mendorong BPH Migas ini supaya lebih ini lagi, Bu. Saya bertanya itu *aja*, Bu, bagaimana cara Ibu melakukan fungsi pengawasan seluruh Indonesia terkait dengan personil yang Ibu miliki saat ini.

Sekian, terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI XII (PUTRI ZULKIFLI HASAN, S.Mn., M.Bus./F-PAN):

Walaikumsalam warahmatullah wabarakatuh.

Terima kasih, Pak Mulyadi.

Selanjutnya sebelum Ibu Kepala BPH Migas beserta jajarannya menanggapi, saya memberikan kesempatan putaran kedua mungkin bagi anggota yang belum bertanya. Kita urut lagi atau? Urut lagi ya. Dari PDI? Tidak ada lagi ya. Golkar? Cukup? Lalu Gerindra, silakan.

F-P.GERINDRA (ROCKY CHANDRA):

f

Baik. Terima kasih, Pimpinan.

Sudah banyak di pembicara terdahulu sudah banyak memberikan masukan. Saya ingin bertanya *aja nih*. Izin interaksi, Pimpinan. Ini ada fungsi BPH Migas pengawasan. Saya mau tanya *nih, ending* dari pengawasan ini apa, Bu? Apakah penindakan ataukah hanya rekomendasi? Apakah memang betul langsung bisa mengeksekusi, Bu? Saya interaktif *aja* dulu, Bu, supaya bisa ini.

WAKIL KETUA KOMISI XII (PUTRI ZULKIFLI HASAN, S.Mn., M.Bus./F-PAN):

Silakan.

KEPALA BPH MIGAS:

Baik, jadi dari pengawasan itu memang kami tidak mempunyai wewenang sampai penindakan penangkapan begitu *nggak* ada. Tetapi kami melakukan koreksi-koreksi terhadap angka-angka yang bisa diberikan subsidi. Jadi dari verifikasi volume, baik di *on desk* maupun dari pengawasan kami ke lapangan.

F-P.GERINDRA (ROCKY CHANDRA):

Oke.

KEPALA BPH MIGAS:

Nanti ujungnya itu adalah koreksi terhadap nilai subsidi yang bisa dibayarkan oleh pemerintah kepada badan usaha.

F-P.GERINDRA (ROCKY CHANDRA):

Oke.

KEPALA BPH MIGAS:

Tapi kalau untuk penangkapan itu kami *nggak* punya wewenang, Pak. Jadi biasanya kalau kita menemukan satu penyalahgunaan itu kami laporkan ke kepolisian, Pak.

F-P.GERINDRA (ROCKY CHANDRA):

Oke, baik. Terima kasih, Bu.

Berarti *ending* dari pengawasan ini adalah koreksi terhadap kuota yang diberikan kepada pihak ketiga tadi, begitu kira-kira ya, Bu?

KEPALA BPH MIGAS:

Koreksi terhadap subsidi yang dibayarkan.

F-P.GERINDRA (ROCKY CHANDRA):

Subsidi yang dibayarkan, betul. Berarti.

KEPALA BPH MIGAS:

Rekomendasi sanksi, Pak.

F-P.GERINDRA (ROCKY CHANDRA):

Izin, saya belum selesai, izin. Berarti kalau rekomendasi bisa, Bu, ke penegak hukum ataupun ke Pertamina *gitu* ya, Bu?

KEPALA BPH MIGAS:

Iya, Pak. Kita merekomendasikan kepada Pertamina untuk memberikan sanksi kepada SPBU, kita punya aturannya.

F-P.GERINDRA (ROCKY CHANDRA):

Oke, baik.

KEPALA BPH MIGAS:

Kemudian merekomendasikan kepada Kapolda untuk menindaklanjuti penyalahgunaan, kita kasih data, seperti itu, Pak.

F-P.GERINDRA (ROCKY CHANDRA):

Baik. *Makasih*, Bu.

Berarti *kan* banyak sekali permasalahan di Indonesia ini, Bu, dengan sedikit personil seperti itu, tadi teman-teman juga menceritakan. Saya dari Jambi, Bu. Di Jambi itu *illegal mining* luar biasa, Bu. Bahkan ada pengusaha BBM itu pemilik SPBU itu menyampaikan ke saya kalau *nggak* dicampur *nggak* untung ini barang katanya. Jadi mayoritas mungkin bisa lebih banyaklah ya, Bu. SPBU itu memang campur minyaknya, Bu, dari *illegal mining* yang berada di Provinsi Jambi dan saya yakin di provinsi lainnya juga seperti itu. Secara logika siapa coba yang menyerap sumur-sumur yang ilegal ini kalau bukan SPBU. Pasti mereka juga yang menyerap. *Nah*, ini pengawasan yang penting, Bu, apakah ada cek berkala di setiap SPBU. Kalau cek berkala di setiap SPBU itu saya minta, Bu, jangan dijadwalkan, disidak *aja*. Kalau dijadwalkan sudah main mata *aja* itu, *nggak* akan pernah ada *ketangkap*.

Terus di daerah itu banyak sekali raja-raja kecil, Bu, raja-raja kecil yang menguasai SPBU yang harus *nyetor* BBM pakai jerigen. Itu banyak sekali. *Nah*, apakah bisa melalui BPH Migas kami melaporkan kepada BPH Migas SPBU-SPBU yang nakal ini, pengusaha yang nakal itu terus bisa ditindak direkomendasikan *gitu loh*? Kalau saya bisa, saya kasih laporannya nanti, Bu.

Berikutnya.

KEPALA BPH MIGAS:

Izin, Ibu. Jadi kami juga sudah membuka layanan pengaduan, Pak. Kita punya *helpdesk* untuk pelayanan pengaduan dari masyarakat.

F-P.GERINDRA (ROCKY CHANDRA):

Oke.

KEPALA BPH MIGAS:

Ada nomor WA-nya, seperti itu.

F-P.GERINDRA (ROCKY CHANDRA):

Baik.

Bu, saya izin *nih*, Bu, mau *ngasih* masukan, Bu. Kalau bisa *nggak* usah layanan pengaduan, Bu, bingung orang, Bu. Ibu buka *aja* di media sosial, banyaklah itu yang *ngadu*, Bu. Foto-foto orang *ngantri* pakai jerigen, foto-foto orang mobil yang *ngantri* bolak-balik untuk *ngelansir* minyak itu banyak itu, Bu. Kalau *hotline* itu *nggak* ada masyarakat di kabupaten yang bisa *nelpon*, Bu. Buka *aja* di media sosial *tuh*, banyak aduan itu, Bu.

Oke, selanjutnya terkait juga program anggaran Ibu yang dicantumkan untuk 2025 hanya program yang langsung berdampak kepada masyarakat. Anggaran yang lain *nggak* ada? Saya lihat saya bolak-balik tadi yang Ibu sampaikan ini hanya anggaran yang berdampak kepada masyarakat sebesar tiga puluh miliar sekian sekian. Apa hanya ini anggarannya? Apa ada yang lain ini, Bu? Saya izin interaktif, Pimpinan.

WAKIL KETUA KOMISI XII (PUTRI ZULKIFLI HASAN, S.Mn., M.Bus./F-PAN):

Interaktif *nggak* apa-apa. Silakan dijawab, Ibu, singkat.

KEPALA BPH MIGAS:

Anggarannya ada di halaman, sebentar, Pak. Tidak hanya itu, Pak.

F-P.GERINDRA (ROCKY CHANDRA):

Hah?

KEPALA BPH MIGAS:

Tidak hanya itu. Jadi untuk program strategis itu misalnya ada di halaman 21, Pak, ada beberapa seperti supervisi pembangunan, penyaluran BBM Satu Harga, kemudian juga untuk pengaturan *cross* transmisi. Jadi tidak hanya yang. Inikan hanya tiga puluh miliar, Pak, kalau yang di halaman 22. Tapi

kami memang menekankan bahwa anggaran kami itu juga digunakan untuk kepentingan masyarakat.

F-P.GERINDRA (ROCKY CHANDRA):

Baik. *Makasih*, Bu.

Ini juga agak miris juga ini, Pimpinan, terkait program yang berdampak langsung kepada masyarakat. Ini banyak sekali daerah-daerah penghasil Migas yang hanya sedikit menerima program yang langsung bersentuhan kepada masyarakat, Bu. Harusnya daerah-daerah penghasil Migas ini mendapatkan lebih atas program-program yang langsung berdampak kepada masyarakat. Ini kalau saya lihat di tahun 2024 itu anggarannya hanya empat miliar. Kalau yang berdampak langsung kepada masyarakat hanya empat miliar sekian dibagi sekian provinsi. Terus juga realisasinya juga sampai di November ini belum terealisasi sepenuhnya. Jadi kalau bisa BPH Migas untuk program yang berdampak langsung kepada masyarakat, terutama bagi daerah-daerah penghasil Migas, itu bisa diprioritas dan dlebihkan, karena memang daerah itu sangat berharap sekali program-program seperti ini, Bu.

Itu saja mungkin dari saya, Pimpinan.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI XII (PUTRI ZULKIFLI HASAN, S.Mn., M.Bus./F-PAN):

Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh.

Lanjut dari Partai Nasdem.

F-P.NASDEM (GULAM MOHAMAD SHARON):

Ya, terima kasih, Pimpinan.

Saya Gulam Muhammad Sharon dari Dapil Kalimantan Barat.

Ini saya *pengen* sedikit menyampaikan keluhan dari kawan-kawan di Kalbar, Bu. Jadi tadi Pak Cornelis ada WA saya juga, jadi minta tolong sampaikan, karena beliau *kan* lagi di Dapil, jadi ada berita ini masuk di media lokal keluhan dari pengusaha-pengusaha Hiswana di sana terkait dengan penetapan kuota BBM. Jadi ada beberapa, ini Pak Cornelis minta sampaikan ada beberapa lembaga penyalur yang letaknya itu di daerah atau di pedalaman *kok* kuotanya bisa lebih banyak dibandingkan lembaga penyalur yang letaknya di jalan poros. Dan sebabnya itu apa dasar penentuan kuota tersebut? Karena *kan* kebetulan dari Kalbar di Komisi XII ini saya sama Pak Cornelis mewakili untuk di Komisi XII.

Jadi keluhan kawan-kawan di sana ini terkait penetapan kuota BBM di sana. Kita *kan ndak* pegang *nih* datanya, kuotanya, jadi kita mau *ngomong* pun susah. Kuota di sini berkurang, apa sebab di sini *nambah*, kami *ndak* pegang. Jadi begitu ditanya seperti itu ya kita agak kalang kabut juga, *gimana* datanya? Kalau kita *ngomong nggk* pakai data *kan* susah juga. Itu yang pertama.

Yang kedua, tadi saya lihat *kan* kita ada seminar-seminar, Bu. Kebetulan kalau di Dapil saya, Dapil II Kalimantan Barat dan Dapil I, masih banyak daerah-daerah pedalaman yang mereka membutuhkan BBM. Kalau *ndak* salah saya *kan* BPH Migas itu ada menerbitkan surat rekomendasi untuk penyaluran BBM ke daerah-daerah, Bu, dan ini sangat membantu sekali masyarakat-masyarakat di pedalaman untuk menikmati BBM. Cuma kendalanya kadang-kadang beberapa teman-teman kita yang membeli BBM dengan rekomendasi tersebut masih ditangkap sama APH, padahal mereka membawa rekomendasi yang ditandatangani oleh Kades dan SKPD terkait, dan itu benar-benar digunakan untuk di daerah tersebut.

Apakah tidak sebaiknya nanti dari BPH Migas dia itu melibatkan Hiswana Migas serta aparat penegak hukum yang terkait di sini untuk mensinkronisasi, Bu. Jadi teman-teman kita yang hanya buat perutnya kenyang, bukan untuk mencari kekayaan itu bisa juga menikmati yang dirasakan oleh masyarakat kota terhadap BBM yang ada di kampung-kampung. Karena salah satu cita-cita Pak Presiden ini supaya energi ini bisa dinikmati sampai masyarakat yang ada di pedalaman dan kita berusaha untuk bisa mewujudkan asta citanya Pak Presiden, Pak Prabowo.

Nah, setelah itu dengan adanya tadi yang kita minta supaya ada transparansi masalah kuota BBM kalau ada apa-apa di lapangan, di Dapil kita, kita bisa menjelaskan sama kawan-kawan. Kadang-kadang *nih* ditelepon *nih*, Bu, sama media, "Pak, di sini BBM-nya kurang", Kami *nggak* tahu. *Kan* kesulitan kita *nih*, Pak, untuk menjelaskan. Sedangkan salah satu fungsi kita *nih kan* sama kayak BPH *kan*, pengawasan, dan kita berusaha supaya antara kami DPR yang ada di sini dengan BPH Migas ini bisa sinergi, Pak. Jadi supaya kalau ada isu-isu di lapangan yang agak sensitif itu bisa saling *check and balance lah* supaya penyaluran pun bagus, masyarakat pun bisa menikmati BBM sampai ke pedalaman.

Mungkin hanya itu dari saya, Bapak-Ibu.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI XII (PUTRI ZULKIFLI HASAN, S.Mn., M.Bus./F-PAN):

Walaikumsalam warahmatullah wabarakatuh.

Selanjutnya dari Fraksi PKB? Cukup? Fraksi PKS?

F-PKS (Hj. MEITRI CITRA WARDANI, S.H.):

f

Pimpinan!

WAKIL KETUA KOMISI XII (PUTRI ZULKIFLI HASAN, S.Mn., M.Bus./F-PAN):

Iya, Mbak Meitri.

F-PKS (Hj. MEITRI CITRA WARDANI, S.H.):

Baik, izin.

Terima kasih.

Sedikit memberi keterangan secara aturan, secara jelas bahwa BPH Migas ini sudah diatur sebagai fungsi pengawasan. Dalam tahun kemarin 2023 kebetulan di Dapil Meitri di daerah Mojokerto itu ada penyelewengan solar subsidi sejumlah 45,5 ton dan itupun disaksikan oleh aparat. Tetapi sampai detik ini di tahun ini penyelewengan itupun masih ada dan orang yang sama, pihak yang sama.

Lalu tadi juga disampaikan oleh Kepala BPH bahwa BPH itu punya *call center*. *Alhamdulillah* tidak jalan, setiap ada pelaporan dari konstituen itu tidak ditindaklanjuti sampai hari ini dan juga harapannya bagaimana nanti ke depannya sinergi dari BPH ini, apakah hanya diam saja atau tertulis saja ataukah *nggak* ada gerak sama sekali? mungkin itu.

Terus tadi terkait pagu dari anggaran 2025, apakah memungkinkan ataukah hanya berlebih-lebihan *aja*? Karena selama ini di lapangan, khususnya Dapil kami, Dapil saya di Mojokerto dan Jombang itu ada daerah terpencil sangat kekurangan terkait BBM.

Mungkin itu dari saya, Pimpinan. Kurang lebihnya mohon maaf. *Akhirul kalam,*

*Wabillahit taufiq wal hidayah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

WAKIL KETUA KOMISI XII (PUTRI ZULKIFLI HASAN, S.Mn., M.Bus./F-PAN):

Baik, terima kasih.

Lanjut Fraksi PAN. Tidak ada? Fraksi Demokrat.

F-P.DEMOKRAT (NURWAYAH, S.Pd.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya, Nurwayah, hanya ingin memberikan saran kepada Kepala BPH Migas dan jajaran juga ada satu pertanyaan. Yang pertama adalah saran terkait masalah SPBU nelayan dan SPBU. Saya mengharapkan agar BPH Migas memperketat *monitoring* penyaluran subsidi solar.

Yang kedua adalah kaitan dengan pajak PBBKB, mohon diperketat pengawasan INU melalui BPH Migas agar menambah pemasukan daerah. Karena kita tahu PBBKB di Jakarta itu lumayan tinggi, itu 10%. Di Jakarta itu 10% ya, Pak? Jadi cukup tinggi. Kemudian di Merak itu 5% dan di Patimban 5%.

Dan yang ketiga adalah kaitan dengan *sourching* INU, mohon diperketat pengawasannya melalui BPH Migas. Kemudian pertanyaannya apa tindakan nyata yang telah dilakukan oleh BPH Migas untuk melakukan pengendalian kuota BBM bersubsidi dan sudah berapa besar penyelewengan solar subsidi yang berhasil dicegah oleh kerja BPH Migas? Karena kita melihat banyak sekali minyak-minyak subsidi yang diselewengkan, dijual menjadi industri, Pak. Saya melihat minyak-minyak subsidi itu dijual dalam bentuk industri, dari darat dijual ke laut, Pak, dari mobil-mobil tangki dioper ke kapal-kapal tanker dan ini sudah berlangsung begitu lama. Memang ada beberapa yang ditangkap, diproses, tapi ada juga yang bebas. *Nah*, ini tolong dijelaskan sudah berapa banyak yang dilakukan penindakan.

Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI XII (PUTRI ZULKIFLI HASAN, S.Mn., M.Bus./F-PAN):

Baik. Terima kasih, Bapak-Ibu Anggota Komisi XII DPR RI.

Sudah cukup? *Oh* terakhir Bang Fasha, silakan.

F-P.NASDEM (Dr. SYARIF FASHA, S.E., M.E.):

Baik. Terima kasih, Pimpinan.

Saya cuma menyambung yang sampaikan oleh rekan kami, Pak Mulyadi dan Bung Rocky. Yang pertama yaitu di sini ada koordinator provinsi nanti, Bu, tolong disampaikan nomor *handphone* masing-masing. Ada 9 kami lihat di sini, kami *pengen* biar bisa komunikasi nanti.

Kedua, terkait dengan perjanjian, Pertamina itu membuat kontrak dengan SPBU, isinya salah satu klausulnya itu membunyikan Pertamina tidak bertanggung jawab terhadap volume maupun muatan apabila transportir sudah meninggalkan depo ke SPBU. Tetapi SPBU membayar harga BBM itu sampai ke SPBU, bukan sampai ke mulut depo. Kedua, transportir tidak bertanggung jawab terhadap muatan yang diisi oleh depo. Inilah yang terjadi yang disampaikan oleh rekan kami, Bung Rocky, terjadi penyelewengan, *kencing* di jalan, oplosan dan lain sebagainya. *Nah*, di sini tidak ada pernah yang menegur Pertamina seperti apa. Banyak SPBU menjadi korban. *Nah*, kenapa SPBU bermain *kencing ngoplos*? Karena margin terlalu rendah, margin yang dibuat

Pertamina terhadap SPBU terlalu rendah. Dari 15 tahun yang lalu margin sampai dengan saat ini dari harga bensin 6.000 sampai sudah 10, 12, 13, 14 itu masih tetap di harga 200 sampai 300 perak, sedangkan kewajiban SPBU itu semakin tahun semakin meningkat. BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, UMR-nya lagi harus dinaikkan, kewajiban lagi, fasilitas toilet dan lain sebagainya pasti pas digitalisasi itu mengeluarkan dana semua, margin tidak naik. Itu yang menyebabkan SPBU bermain bagaimana menutupi operasional. *Nah*, ini belum ada apakah revisi kontrak. Coba kita lihat nanti kontrak yang dibuat Pertamina terhadap SPBU itu. Mungkin BPH Migas perlu campur tangan. SPBU ini adalah mitra, karena dia penyalur. Pertamina tidak akan bisa apa-apa tanpa SPBU, jadi jangan sampai pengusaha SPBU ini menjadi pelayan. Dibuat bagaimana poros mitra ini. Mungkin BPH perlu *menengahin* ini semua nanti. Ini yang kami tekankan.

Kedua, perlu juga diketahui BPH Migas banyak daerah yang dipaksakan menjual Pertamina Dex dan Pertamina Turbo. Saran kami Pertamina Dex dengan Pertamina Turbo ini itu hanya untuk di Ibu kota saja, seperti kota-kota besar DKI, Bandung, mungkin Surabaya, Palembang, Medan. Tetapi kota-kota kecil tidak layak. Karena nanti pengusaha mengeluh semua. Mereka tidak bisa jual Pertamina Dex, Pertamina Turbo, tetapi yang adanya penguapan. Penguapan ini luar biasa, penguapan dua komponen material ini terlalu tinggi. Jadi pengusaha itu hanya membeli cuma untuk menyimpan dan siap-siap rugi, karena ini *nguar* terus. Jadi tidak beres. Tapi mereka dipaksa oleh Pertamina menjual ini. *Nah*, ini BPH Migas selaku pengatur hulu ini untuk mengatur bagaimana penjualan ini tidak cocok, kota ini jangan jual Pertamina, *dikurangin*. Yang perlu apa, mungkin diperbanyak Peralite dan lain sebagainya. *Nah*, ini yang kami katakan tadi bagaimana mengatur subsidi ini dengan sedemikian sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing, jangan disamaratakan semua ya. Mungkin itu.

Kami punya kasus, Bu BPH Migas. Yang Ibu katakan tadi bahwa yang disampaikan Bung Rocky, BPM Migas hanya cuma merekomendasikan. Kami minta peran ini diperbesar. Contoh di wilayah kami Jambi, wilayah kami Jambi dulu angkutan batu bara itu menggunakan BBM solar SPBU. Bayangkan, Bu, ada 40.000 mobil, 40.000 mobil mengangkut batu bara itu. Satu mobil dalam dua hari mengisi 200 liter. Satu bulan itu 15 trip. Jadi mereka sudah membeli solar subsidi ini satu tahun itu sampai 1,2 juta KL yang tidak tepat sasaran. Apakah salah SPBU? Tidak, SPBU tidak bisa disalahkan. Karena kenapa? Mereka sudah menjaga supaya solar-solar ini truk batubara jangan masuk. Tapi apa daya mereka, karena jumlah truk ini ribuan sekali satu SPBU. Mereka tidak mampu dengan jumlah hanya personil satpam hanya 2-3 orang. Mereka minta bantu polisi pengamanan, polisi militer pengamanan. Tapi apa yang terjadi? Polisi hanya mengamankan sanggup hanya satu minggu. Kalau sudah sampai bulan-bulan, siapa *nanggung* konsumsinya? Bagaimana uang transportasi mereka bertugas di pelosok-pelosok dan lain sebagainya? *Nah*, polisi tidak mampu.

Nah, jadi ada mungkin Ibu menganggarkan juga mungkin dana seperti apa atau disampaikan kepada Pertamina untuk petugas-petugas kepolisian/TNI yang bertugas ada *lah* uang konsumsi mereka, transportasi

mereka. Jangan dibebankan kepada SPBU ini. Inilah yang mengakibatkan terjadinya kebocoran subsidi ini. Mungkin BPH sudah tahu masalah ini, tapi mungkin perpanjangan tangan BPH terbatas. *Nah*, apa yang bisa kami *support* supaya tangan Bapak-Ibu ini lebih kuat lagi, bisa menindak. Jangan hanya menindak SPBU-nya. SPBU itu sudah tidak ada lagi keuntungan apa-apa, Bu, sudah jadi korban saat ini.

Itu yang perlu kami sampaikan. Mungkin perlu bagaimana memformulasikan kembali, sehingga BPH Migas ini langsung bisa misalnya menganggarkan, membantu pihak-pihak penjaga keamanan, dan lain sebagainya untuk menjaga di mulut-mulut SPBU ini.

Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI XII (PUTRI ZULKIFLI HASAN, S.Mn., M.Bus./F-PAN):

Baik. Terima kasih atas tanggapan, pertanyaan dan pandangan dari Bapak dan Ibu Anggota Komisi XII DPR RI.

INTERUPSI F-P.GERINDRA (H. ROKMAT ARDIYAN, M.M.):

Izin. Satu, Pimpinan.

WAKIL KETUA KOMISI XII (PUTRI ZULKIFLI HASAN, S.Mn., M.Bus./F-PAN):

Satu, terakhir ya.

F-P.GERINDRA (H. ROKMAT ARDIYAN, M.M.):

Pertanyaan saya kepada BPH Migas, berapa kerugian negara setiap tahun terhadap penyelewengan?

Yang kedua, Pimpinan, jadi dengan pengawasan yang begitu luas, NKRI yang begitu luas, kemudian jumlah yang diawasinya nilainya ratusan triliun, maka BPH Migas kami mendorong untuk penambahan anggaran serta penyederhanaan sistem digitalisasi dalam proses pengawasan dan penambahan sumber daya manusianya.

Demikian, terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI XII (PUTRI ZULKIFLI HASAN, S.Mn., M.Bus./F-PAN):

Baik, *makasih*.

INTERUPSI F-P.DEMOKRAT (Ir. H. MULYADI):

Interupsi, Pimpinan. Sedikit, sebelum ditanggapi.

WAKIL KETUA KOMISI XII (PUTRI ZULKIFLI HASAN, S.Mn., M.Bus./F-PAN):

Ya, silakan.

F-P.DEMOKRAT (Ir. H. MULYADI):

Jadi tadi seperti yang ditanyakan oleh teman kita tadi, mohon kiranya disampaikan anggaran yang terkait dengan fungsi pengawasan, Bu. Karena saya lihat fungsi utamanya *kan* pengawasan, harusnya anggarannya yang paling besar harusnya dalam rangka melaksanakan fungsinya. Tapi di sini saya belum lihat. Tolong itu ditonjolkan nanti pada saat Ibu merespon pertanyaan dari Anggota Komisi XII. Kemudian tolong diberikan juga, disampaikan juga, walaupun sekarang mungkin tidak lengkap, nanti lengkapnya tertulis, rekomendasi yang sudah Ibu keluarkan terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama ini rekomendasinya per provinsi, sehingga saya bisa melihat di daerah saya rekomendasinya apa saja yang sudah, dengan terjadinya penyelewengan selama ini rekomendasinya apa yang sudah dikeluarkan oleh BPH.

Kemudian juga tolong disampaikan, saya melihat selain Peralite itu ternyata saya kira dulu hanya Peralite saja yang kompensasi. Ternyata solar juga ada kompensasi ya? Itu kalau dia melebihi kuota ya? Memang didesain dari awal ya?

KEPALA BPH MIGAS (ERIKA RETNOWATI):

Harganya, Pak.

F-P.DEMOKRAT (Ir. H. MULYADI):

Ada subsidi, ada kompensasi saya lihat kalau untuk solar. Kalau Peralite hanya kompensasi saja. Kenapa itu, Bu?

KEPALA BPH MIGAS (ERIKA RETNOWATI):

Jadi kalau solar itu sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang APBN 1 liter 1.000 untuk subsidiya.

F-P.DEMOKRAT (Ir. H. MULYADI):

Iya betul.

KEPALA BPH MIGAS (ERIKA RETNOWATI):

Nah, kemudian tentu dengan 1.000 itu tidak bisa menutup harga keekonomian ya, Pak. Harga solar itu hanya 6.800. *Nah*, itu selisih antara itu dengan harga keekonomian itu.

F-P.DEMOKRAT (Ir. H. MULYADI):

Oke, oke. Jadi untuk menutupi kekurangan yang ditetapkan oleh APBN ya?

KEPALA BPH MIGAS (ERIKA RETNOWATI):

f

Iya.

F-P.DEMOKRAT (Ir. H. MULYADI):

Oke, terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI XII (PUTRI ZULKIFLI HASAN, S.Mn., M.Bus./F-PAN):

Siap. Cukup?

INTERUPSI F-PDI PERJUANGAN (SHANTY ALDA NATHALIA, S.H.)

Izin interupsi, Pimpinan, satu menit.

Saya cuma ingin menambahkan untuk nanti RDP berikutnya untuk ditampilkan juga laporan mengenai pelanggaran yang sudah masuk ke dalam BPH Migas dan ditindaklanjuti.

Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI XII (PUTRI ZULKIFLI HASAN, S.Mn., M.Bus./F-PAN):

Baik.

Bapak-Ibu, tadi kita.

INTERUPSI F-P.DEMOKRAT (NURWAYAH, S.Pd.):

Interupsi, Pimpinan. Satu lagi, saya lupa.

Saya ingin mengajukan untuk SPBUN untuk di wilayah saya Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing.

Terima kasih, Pimpinan.

WAKIL KETUA KOMISI XII (PUTRI ZULKIFLI HASAN, S.Mn., M.Bus./F-PAN):

Baik.

Bapak-Ibu, tadi kita sudah menyepakati waktu rapat sampai dengan Pukul 12.15. Jadi kita perpanjang sampai dengan 12.30 cukup? Cukup.

(RAPAT: SETUJU)

Baik. Terima kasih atas tanggapan, pertanyaan dan pandangan dari Bapak dan Ibu Anggota Komisi XII DPR RI.

Selanjutnya kami persilakan kepada Kepala BPH Migas untuk memberikan jawaban atas pertanyaan maupun pernyataan dari Anggota Komisi XII DPR RI. Silakan, Ibu.

f

KEPALA BPH MIGAS (ERIKA RETNOWATI):

Baik. Terima kasih atas pertanyaan dan masukan-masukan dari Bapak-Ibu.

Jadi sebagian besar tadi pertanyaan adalah yang terkait dengan pengawasan hasilnya seperti apa, kemudian bagaimana BPH melakukan pengawasan. Mungkin bisa tolong ditampilkan di *slide* berapa ya, kegiatan pengawasan, data dukung 176. Jadi pengawasan yang dilakukan BPH Migas inikan memang tidak bisa diawasi seluruh SPBU. Jadi kami memang melakukan sampling setiap bulan *gitu* ya. Setiap bulan itu melakukan verifikasi volume dan melakukan sampling.

Nah, ini jadi kalau tadi ditanyakan apa saja yang sudah dilakukan BPH untuk mengendalikan dan melakukan pengawasan, yang pertama tadi sudah sempat disampaikan bahwa Pertamina juga mengusulkan revisi Perpres 191 Tahun 2014. *Nah*, itu sebetulnya kami sudah mengusulkan sejak tahun 2022 ya bersama dengan para *stakeholder* kita membuat draftnya. Tetapi memang sampai saat itu, sampai saat ini Perpres itu belum diterbitkan. Tetapi nanti apa namanya pemerintah tentunya akan tetap memperbaiki regulasi yang terkait dengan pengaturan konsumen pengguna. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa khususnya untuk JBKP (Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan) Peralite itu sampai sekarang masih semua boleh menggunakan. Jadi tidak ada pengaturannya.

Boleh balik lagi ke yang tadi. Itu pertama ya, kita mengusulkan, tadi sudah ada yang menyampaikan bahwa sebetulnya kriteria konsumen pengguna itu *nggak* jelas *gitu kan*. Ini kita berusaha memperjelas di dalam draft tersebut. Kemudian kita juga punya pengaturan mengenai volume yang boleh dikonsumsi, batasan volume yang boleh dikonsumsi oleh konsumen, khususnya untuk solar ya. Jadi solar itu ada aturan volume maksimal yang boleh dikonsumsi. Tolong jangan dipindahkan dulu ya.

Kemudian yang ketiga adalah pengaturan terkait dengan penerbitan surat rekomendasi untuk pembelian solar dan Peralite untuk usaha pertanian, perikanan, usaha mikro, dan layanan umum. *Nah*, ini saat ini kita sudah membuat satu aplikasi untuk supaya penerbitan itu lebih mudah, kemudian juga supaya kita mempunyai hasil data yang lebih akurat. Tadi ada yang menyampaikan juga bahwa realisasi daripada kuota untuk nelayan itu *kok* rendah *gitu* ya.

Padahal kita mendengar di beberapa tempat nelayan susah *gitu kan*. Kalau kita lihat dari kuota SPBUN itu realisasinya kecil. *Nah*, ternyata nelayan itu juga ada yang mengambil di SPBU reguler *gitu*. Jadi tidak hanya ngambilnya itu di SPBUN. Itu yang selama ini tidak *ter-record gitu kan*. *Nah*, sehingga kemudian kita membuat satu aplikasi supaya kita bisa meng-*capture*, sebetulnya berapa *sih* konsumsi daripada nelayan ini. Jadi kita bisa ke depannya bisa melakukan perencanaan yang lebih akurat. *Nah*, dengan aplikasi yang kita kasih nama XStar itu datanya sudah terintegrasi antara

Pemda yang mengeluarkan surat rekomendasi dengan Pertamina dan juga dengan BPH Migas. Jadi di manapun dia membeli nanti akan bisa ter-*record* di tempat kami supaya kita bisa mendapatkan volume yang sebenarnya yang dikonsumsi oleh nelayan.

Kemudian kita juga sudah menerbitkan peraturan BPH Nomor 1 Tahun 2024 itu untuk sup penyalur di daerah 3T khususnya, di mana di sana belum terdapat SPBU *gitu* ya, karena *kan* memang belum semua daerah memiliki SPBU. *Nah*, itu kita membuat satu aturan terkait dengan sub penyalur. Jadi sub penyalur ini adalah satu kelompok konsumen *gitu* ya yang dia bisa dengan perwakilannya mendapatkan BBM di SPBU. Jadi *nggak* semua orang berbondong-bondong mencari SPBU yang mungkin tempatnya jauh *gitu* ya, bisa ada perwakilan.

Kemudian berikutnya XStar tadi sudah saya sampaikan. Kemudian.

INTERUPSI F-P.NASDEM (GULAM MOHAMAD SHARON):

Izin, Pimpinan. Ibu Ketua, izin interaktif.

WAKIL KETUA KOMISI XII (PUTRI ZULKIFLI HASAN, S.Mn., M.Bus./F-PAN):

Silakan.

F-P.NASDEM (GULAM MOHAMAD SHARON):

Tadi Ibu yang penjelasan terkait untuk penyaluran yang di pedalaman, di daerah. Saya mau tanya, nanti kalau misal disalurkan *nih* ke daerah pedalaman, itu apakah harus tetap kayak pakai model Pertashop atau boleh pakai drum atau seperti apa? Karena kalau nanti itu *ndak* ada *kan* tiba-tiba nanti datang APH datang dibidang ilegal, *ndak* sesuai. Itu kayak *gimana*, Bu? Apakah itu *udah* diatur atau belum?

Terima kasih.

KEPALA BPH MIGAS (ERIKA RETNOWATI):

Iya, jadi sub penyalur itu tidak seperti Pertashop, Pak. Jadi dia boleh menggunakan drum *gitu* ya. Karena dia betul-betul mengambil itu untuk kelompoknya *gitu*, misalnya kelompok petani *gitu kan*, jadi dia *ngambil* kemudian begitu sampai nanti langsung dibagikan kepada petaninya dan kita ada maksimal yang boleh diambil. Berapa? 3 KL ya? 3 ton, Pak. Jadi dia boleh menyimpan sampai 3 ton, tetapi betul-betul hanya untuk kelompoknya. Dan dia harus punya daftar kelompoknya itu siapa saja. Ini untuk memudahkan masyarakat di daerah pedalaman yang memang jauh dari SPBU seperti itu. Dan itu penetapan dari sub penyalur itu melalui bupati. Jadi kita mengevaluasi, tetapi nanti SK-nya dari bupati setempat, seperti itu.

F-P.NASDEM (GULAM MOHAMAD SHARON):

f

Otomatis *kan gini*, kalau kita *ngambil* daerah SPBU, jual sampai ke daerah itukan ada jarak tempuh. Kalau untuk kayak tempat saya itu *ndak* bisa dihitung jarak per kilometer, Bu, karena kadang-kadang pada saat musim hujan mungkin *nih* kayak di daerah Sumatera juga beberapa ya belum ada aspalnya, jadi kadang-kadang kalau musim hujan itu untuk menempuh jarak 20 km itu kadang-kadang bisa sampai 8 jam karena kondisi jalan yang rusak.

Nah, yang kita perlu dapat itu mereka ini nanti untuk penetapan harga mekanisme penjualan mereka di sana itu *gimana*. Karena dulu tahun 2013 itu ada surat, 2013 atau 2014 *gitu*, dari Kabupaten Melawi ke istana yang bilang kalau harga solar itu Rp25.000,-. Jadi pada saat itu saya tanya itu lokasi yang Rp25.000,- di mana? *Nggak* tahunya itu masih *nyebrang* sungai, setelah *nyebrang* sungai jalan lagi sekitar 30-40 kilo dengan jalan yang kondisinya cukup sulit. Jadi jangan sampai nanti *kan* rancu, Bu. Kita *kan* fungsi kita di sini kita *pengen* BPH juga nanti penyalurannya enak, jadi kalau ada apa-apa di lapangan kita juga bisa bantu nanti biar sinergi. Itu, Bu.

KEPALA BPH MIGAS (ERIKA RETNOWATI):

Iya, Pak. Jadi memang ongkos angkut itukan *nggak* mungkin tidak ada *gitu* ya, karena memang butuh biaya untuk mengambilnya. *Nah*, itu nanti disepakati di antara konsumen itu, kelompok itu, dan itu dituangkan di dalam SK bupatinya, Pak.

INTERUPSI F-P.DEMOKRAT (Ir. H. MULYADI):

Interupsi, Pimpinan. Interupsi, Bu.

WAKIL KETUA KOMISI XII (PUTRI ZULKIFLI HASAN, S.Mn., M.Bus./F-PAN):

Silakan.

F-P.DEMOKRAT (Ir. H. MULYADI):

Itu kalau bisa begini saya usul, Ibu tanggapi dulu seluruh pertanyaan kita, *kan* masing-masing kita bertanya tadi, setelah itu baru kita diberi kesempatan semuanya untuk menanggapi. Kalau *nggak* nanti *nggak* selesai. Nanti hanya satu pertanyaan satu Anggota saja yang bisa Ibu jawab, yang lain-lainnya *nggak* terjawab nanti. Kalau bisa itu usul, Pimpinan.

WAKIL KETUA KOMISI XII (PUTRI ZULKIFLI HASAN, S.Mn., M.Bus./F-PAN):

Jadi Ibu silakan menanggapi.

KEPALA BPH MIGAS (ERIKA RETNOWATI):

Mungkin bisa menjawab beberapa pertanyaan dari Anggota, Pak.

Kemudian yang terkait dengan tadi kendaraan yang mengangkut batu bara itu sebetulnya sudah ada edaran dari Ditjen Minerba, Pak, yang melarang

kendaraan pengangkut batu bara itu menggunakan solar *gitu kan*, menggunakan BBM bersubsidi. Itu sudah ada sebetulnya aturannya memang. Tapi dalam prakteknya di lapangan masih banyak itu kita sadari, Pak, seperti itu. *Nah*, kemudian itu adalah yang terkait pengendalian dengan regulasi.

Nah, untuk pengawasan, cara-cara yang kita lakukan adalah pertama pengawasan lapangan secara rutin oleh tim BPH Migas. Rutin di sini bukan berarti terjadwal kemudian kita sampaikan jadwal kita kapan, ke mana, *nggak* seperti itu ya. Jadi kita biasanya melihat juga dari hasil, dari verifikasi di meja *gitu* ya, kita punya data kira-kira di mana yang harus kita cek ke lapangan, kemudian kita lakukan pemeriksaan lapangan. Kemudian kita juga memanfaatkan IT tentu saja dengan adanya digitalisasi nozzle, kemudian kita punya aplikasi Silvia untuk merekrut mulai dari perencanaan sampai *monitoring*.

Nah, kemudian kita juga sudah melakukan kerja sama dengan APH, Pak Mulyadi. Jadi kami sudah punya PKS dengan Kepolisian, kemudian dengan TNI, dengan BAIS, Baintelkam, sudah cukup banyak ya sebenarnya. Kemudian juga dengan Pemda, *nih* yang sedang kita galakkan adalah PKS dengan Pemda, agar mereka bersama-sama kami bisa melakukan pembinaan, khususnya terhadap penerbitan surat rekomendasi. Karena nanti yang menerbitkan surat rekomendasi itu adalah dari dinas-dinas yang ada di kabupaten. Jadi kami melakukan PKS dengan provinsi supaya mereka juga ikut mengawasi.

Kemudian pengawasan terpadu bersama dengan Itjen, Kementerian ESDM dan juga Ditjen Migas dalam tim gugus tugas pengawasan. Kemudian pengawasan bersama dengan pemerintah daerah. Dan ini kami sampai saat ini sudah ada 14 Pemda yang melakukan kerja sama dengan kami, pemerintah provinsi dan rencananya kami akan meneruskan sampai semua provinsi punya PKS dengan kami. Karena memang tadi dengan keterbatasan personil dari kami, kami sulit untuk menjangkau seluruh NKRI. Jadi kami memang butuh bantuan juga dari Pemda untuk melakukan, khususnya pembinaan atas penerbitan surat rekomendasi. Jadi itu adalah langkah-langkah untuk pengendalian dan pengawasan.

Kemudian tadi ditanyakan juga hasilnya seperti apa *gitu kan*. *Nah*, ini kita ada data untuk 2024 bisa di lampiran halaman 35. *Nah*, ini adalah hasil dari pengawasan yang kita lakukan di bulan Januari sampai dengan Oktober 2024. Jadi kita melakukan verifikasi *on desk* untuk semua penyaluran yang dilakukan oleh SPBU ya, ada 6.428 penyalur. Kemudian penyaluran penggunaan BBM subsidi oleh transportasi khusus yaitu untuk kapal-kapal seperti Pelni, ASDP dan juga untuk kereta api yang juga menggunakan solar.

Nah, kemudian dari hasil verifikasi *on desk* itu biasanya kita bisa melihat dari data yang mana yang harus kita lakukan uji petik ke lapangan. *Nah*, itu kita lakukan di satu tahun itu ada 645 SPBU yang kita lakukan uji petik. Jadi sampling ini bisa berdasarkan dari analisa data, kemudian bisa juga pengaduan di masyarakat, bisa juga pemberitaan di media cetak dan elektronik dan pengaduan masyarakat ini kita buka layanan WA dan cukup banyak

masyarakat yang melapor dan sudah kita tindak lanjuti. Jadi kita punya apa namanya SLA-nya juga, Bu. Jadi SLA-nya itu 60 hari kita harus bisa menindaklanjuti yang sudah diadukan oleh masyarakat. *Nah*, kemudian kita juga melakukan pengecekan di CCTV di SPBU di 195 penyalur sebagai tindak lanjut adanya lembaga penyalur yang berpotensi *over* kuota. Jadi kalau dilaporkan oleh Pertamina ini ada potensi *over* kuota, minta tambahan *gitu* ya, kita lihat dulu CCTV-nya dia *bener nggak nyalurannya gitu*. Kalau dia *over* kuotanya *tuh* karena penyimpangan tentu *nggak* kita berikan lagi *gitu* kan.

Kemudian perkiraan subsidi dan kompensasi yang dihemat, koreksi yang kita lakukan sampai dengan bulan Oktober itu sebanyak 3.224,734 KL yang kalau kita hitung total penghematannya dengan asumsi selisih subsidi dan harga keekonomian sebesar 7.940 itu kurang lebih ada Rp25 miliar *gitu* ya. Kemudian volume koreksinya itu memang terbanyak untuk transportasi darat ya 2.338, kemudian untuk kereta api 6, kemudian perikanan 2,6, dan transportasi laut 877. Jadi itu hasil yang kita dapatkan dari hasil pengawasan yang dilakukan untuk verifikasi volume melalui *on desk* maupun ke lapangan.

Selain itu kita juga memberikan keterangan sebagai saksi ahli di kepolisian atas kasus-kasus yang ditemukan oleh kepolisian. Mereka biasanya meminta kita untuk menjadi saksi ahli dan itu cukup banyak juga kasusnya. Ada *nggak* ya datanya? *Nah*, ini, pemberian keterangan ahli, pemberian keterangan ahli sampai dengan 2024 Oktober itu ada 526 kegiatan pemberian keterangan ahli, kemudian yang terbanyak di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jambi dengan volume barang bukti sebanyak 756.253 liter *gitu* ya, barang buktinya terbanyak adalah solar. Jadi ini dari yang kita lakukan keterangan ahli di kepolisian seperti itu. Jadi itu hasil-hasil daripada pengawasan yang kita lakukan.

Kemudian tadi bagaimana kalau kita menjumpai adanya penyalahgunaan? Jadi pada saat kita ke lapangan biasanya *kan* kita cek dari CCTV itu bisa kelihatan kalau ada penyaluran-penyaluran misalnya yang mobil bolak-balik *gitu kan*, helikopter atau mobil yang *ngetem* di situ *tuh* bisa kelihatan dan kita tentunya akan memberikan sanksi kepada SPBU tersebut umumnya adalah ada kerja sama dengan operatornya dan juga kita kemudian meneruskan ke Kapolda biasanya bahwa di SPBU itu diduga ada penyalahgunaan seperti itu, kita teruskan. Kemudian kita sanksi kepada SPBU itu kita tidak melakukan langsung, karena SPBU itu kontraknya dengan Pertamina. *Nah*, ini kita memberikan surat setiap bulan kepada Pertamina hasil dari pemeriksaan kita. Kita paparkan di situ SPBU ini melanggar apa, kemudian sanksinya apa.

Jadi kita sudah punya aturan terkait dengan sanksi yang harus diberikan kepada SPBU jika mereka ada penyalahgunaan dan itu adalah SK Kepala BPH Nomor 64 Tahun 2023. Jadi sanksinya tentu bertingkat, berjenjang ya. Jadi mulai dari yang hanya misalnya CCTV-nya tidak menyorot ke nomor polisi, misalnya *gitu*. Itu kan juga harus kita tegur, itu kan hanya teguran berupa surat. Misalnya kita minta Pertamina menegur surat dan kemudian kita cek kembali sampai dengan kalau yang sangat parah itu bisa kita hentikan penyaluran BBM bersubsidinya. Jadi tergantung dari tingkat penyalagunaannya itu kita ada sanksinya sesuai dengan SK tersebut. Itu yang terkait pengawasan.

Kemudian apa lagi ya mengenai.

INTERUPSI F-PKS (NEVI ZUAIRINA):

Sosialisasi *goes to campus tuh*, Bu, sosialisasi ke kampus-kampus.

KEPALA BPH MIGAS (ERIKA RETNOWATI):

Sosialisasi, Pak-Bu. Iya, memang sosialisasi kebanyakan kita lakukan dengan masyarakat langsung, Bu, di Dapil-dapil bersama dengan Bapak-Ibu dari anggota. Beberapa ada yang kita lakukan sosialisasi di kampus, tetapi itu biasanya ada permintaan dari kampus seperti itu, Bu. Tapi kalau misalnya anggarannya masih ada bisa kita tambahkan untuk yang kampus. Tetapi yang jelas untuk yang ke masyarakat di Dapil itu sudah kita anggarkan seperti itu, Bu.

Ya? Strategi tadi *kan*, Pak. Jadi strategi pertama kita bekerja sama dengan berbagai pihak, dengan instansi-instansi kepolisian, kemudian TNI, kemudian dengan Pemda, kemudian juga menggunakan IT tentunya, Pak, dengan misalnya mendorong Pertamina menggunakan *barcode*, itu kan juga salah satu bentuk daripada pengendalian ya. Kemudian juga menerbitkan aplikasi XStar tadi untuk menerbitkan surat rekomendasi kepada nelayan, petani, dan lain sebagainya, Pak. Seperti itu mungkin, Pak, strategi dari kami.

Kemudian tadi ada pertanyaan yang terkait KPI ya. Jadi KPI itu kenapa kemudian sekarang membayar sebesar itu adalah karena di dalam aturan mengenai iuran di PP 48 itu setiap penjualan atau transaksi jual beli BBM itu kan dikenakan iuran. *Nah*, jadi pada saat Pertamina membuat *sub holding-sub holding* KPI jual kepada PPN, dia kena iuran PPN jual kepada masyarakat, dia kena iuran *dobel gitu kan*. *Nah*, kita *nggak* bisa *menyetop* untuk tidak membayar, karena memang aturannya masih bunyi seperti itu dan itu aturan revisi dari PP 48 itu cukup lama penerbitannya, sehingga kemudian ada jumlah yang sangat besar dari tahun 2021. Jadi bukan karena covid, Pak, tapi memang karena aturannya terlambat untuk disesuaikan dengan adanya *sub holding* itu. Seharusnya memang dengan adanya *sub holding* dia tidak menjual kepada *end user*, harusnya memang dia tidak kena *gitu*. Di dalam revisi PP 48 sudah tidak kena iuran. Yang KPI seperti itu.

INTERUPSI F-P.DEMOKRAT (NURWAYAH, S.Pd.):

Ibu, jangan lupa, Bu, PBBKB. Itu penting sekali, karena nilainya untuk Jakarta itu 10%, pajak bahan bakar kendaraan bermotor itu 10% dari harga dasar. Ini bermanfaat sekali untuk daerah, Bu. Iya, pengawasan untuk INU-INU. Karena kalau agen Pertamina itu wajib langsung dibayarkan pada saat agen Pertamina membeli bahan bakar di Pertamina. Untuk INU itu mereka lakukan sendiri di Dispenda.

Terima kasih.

f

KEPALA BPH MIGAS (ERIKA RETNOWATI):

Jadi tadi *kan* salah satu upaya kita *kan* bekerja sama dengan Pemda ya dalam pengawasan, pengendalian. *Nah*, dari kerja sama itu sebetulnya Pemda itu bisa juga mendapatkan data dari kami berapa *sih* sebetulnya volume yang dikeluarkan atau dijual oleh INU-INU tadi, Bu, dan itu sudah cukup banyak Pemda yang meminta data dari kami. Meskipun data itu tidak bisa langsung digunakan ya, Bu, tetapi paling tidak mereka punya data pembanding dengan PKS *gitu*, mungkin itu.

INTERUPSI F-P.GERINDRA (H. ROKHMAT ARDIYAN, M.M.):

Bagian kuota per daerah provinsi itu?

KEPALA BPH MIGAS (ERIKA RETNOWATI):

Jadi proses, ada *nggak* ya, proses pembagian kuota itukan pertama ditetapkan, misalnya solar ya, ditetapkan di Undang-Undang APBN, ketetapanannya itukan sudah melalui proses Panjang. Kemudian kita juga meminta kepada masing-masing gubernur untuk mengusulkan *gitu* ya. Halaman 97 boleh? Kita meminta kepada kepala daerah untuk menyampaikan usulan-usulan dari volume kuota di tahun berikutnya *gitu* ya. Kalau 2025 itu sudah kita minta dari bulan apa kemarin ya, dari pertengahan tahun itu sudah kita minta. Kemudian juga kita minta kepada KAI, pada Pelni, ASDP dan Pelra untuk mengusulkan juga kuota. *Nah*, kemudian itu kuota itu tentu kita verifikasi bersama-sama dengan Pertamina dan AKR dengan melihat *history* penyaluran di sebelum-sebelumnya dan kita nanti tentunya akan melihat bagaimana pertumbuhan di tahun berikutnya *gitu* ya, berapa persen pertumbuhan ekonomi dan lain lain. Jadi kita bisa memprognosakan kira-kira kebutuhan di satu daerah itu seperti apa dan kemudian setelah itu baru kita menetapkan SK kuota di awal tahun dan kuotanya itu kita lakukan per provinsi, per kabupaten/kota dan juga per titik serah, termasuk juga ada kuota untuk masing-masing sektor.

Kemudian kuota yang kita tetapkan di awal tahun itu setiap triwulan kita evaluasi, Pak. Kita evaluasi setiap triwulan dan bisa dilakukan penyesuaian-penyediaan. Karena kadang-kadang *kan* ada yang berpotensi *over* kuota, tapi tentu kita cek dulu *over* kuotanya kenapa *gitu* ya. *Nah*, itu kita bisa sesuaikan antara yang *over* dengan yang *under* begitu, Pak. Jadi kira-kira seperti itu, Pak. Dasarnya adalah dari permohonan, kemudian tentu kita verifikasi dan juga melihat *history* dan juga pertumbuhan ekonomi daerah tersebut *gitu*, Pak.

WAKIL KETUA KOMISI XII (PUTRI ZULKIFLI HASAN, S.Mn., M.Bus./F-PAN):

Baik. Terima kasih, Ibu Kepala BPH Migas.

Nanti untuk lebih lengkapnya mungkin tadi ada 1-2 pertanyaan yang belum jelas jawabannya, nanti untuk menyampaikan jawaban tertulis atas seluruh pertanyaan, tanggapan dan pernyataan dari Anggota Komisi XII DPR RI.

INTERUPSI F-P.GERINDRA (ROCKY CHANDRA):

Interupsi sedikit, Pimpinan, di sini. Sebelum masuk ke ini.

WAKIL KETUA KOMISI XII (PUTRI ZULKIFLI HASAN, S.Mn., M.Bus./F-PAN):

Ya.

F-P.GERINDRA (ROCKY CHANDRA):

Bu, tadi saya memancing Ibu sebetulnya strategi pengawasan dengan personil yang terbatas. Sebetulnya pengawasan yang paling sederhana supaya pengawasan itu berfungsi dengan baik itu melibatkan masyarakat, Bu. Tadi Ibu mengatakan IT. Contoh sekarang agar SPBU itu tidak main-main, Ibu, agar masyarakat bisa melihat secara *online* setiap SPBU itu per hari itu mendapat BBM subsidi berapa KL. Jangan sampai mereka dapat banyak tahu-tahu jam 10 *udah* habis, jam 12 solar habis, Peralite habis, malam-malam dijual sama dia ke pihak tertentu pakai jerigen dan lain sebagainya.

Jadi transparansi adalah salah satu aspek yang sangat mendasar kalau ingin serius masyarakat terlibat melakukan fungsi pengawasan. Tapi kalau tidak ingin melibatkan masyarakat, saya mencurigai pihak-pihak yang berwenang juga terlibat *kongkalikong*. Jadi *bikin aja* sistem *online*. Misalnya di Dapil saya, Sumatera Barat, SPBU ada 100 atau 125, semua masyarakat melihat SPBU ini hari ini menerima solar subsidi sekian KL, Peralite sekian KL, SPBU 1,2. Masyarakat akan bisa melihat, kalau tiba-tiba dia menyatakan dia dengan perolehan yang begitu banyak, kita akan bisa mengukur. Apalagi SPBU-nya sepi atau *nggak* terlalu banyak kendaraan, tahu-tahu habis BBM subsidi, inikan aneh. Jadi kuncinya setuju *nggak* Ibu membuka fungsi pengawasan ini masyarakat juga bisa ikut mengawasi? Tolong dijawab dulu.

KEPALA BPH MIGAS (ERIKA RETNOWATI):

Kalau melibatkan masyarakat itu sebetulnya dengan membuka yang pengaduan itu, Pak.

F.P-GERINDRA (ROCKY CHANDRA):

Bukan, bukan, bukan itu. Masyarakat tahu bahwa sebuah SPBU itu menerima sekian kilo liter per hari, jadi tidak sistem *online*, supaya masyarakat bisa melihat SPBU A dapat subsidi solar sekian, SPBU B subsidi solar sekian. Jangan sampai dengan modal katanya Pak Bambang, Pak BBG bilang dengan modal kardus dia tulis solar habis, Peralite habis. Inikan banyak permainan begitu, malam-malam, jam 1 malam datanglah orang pakai mobil ambil BBM subsidi itu pakai jerigen, pakai mobil dan lain sebagainya.

Jadi kuncinya menurut hemat saya, Bu, masyarakat harus dilibatkan bahwa tahu bahwa SPBU ini dapat kuota dari Pertamina sekian kilo liter Peralite, sekian kilo liter solar. Artinya masyarakat bisa melihat masa sebanyak ini dalam waktu cuma sebentar *udah* habis *gitu kan*, ini akal-akalan ini *gitu kan*.

Jadi itu, *bikin aja* sebuah sistem supaya masyarakat bisa memantau. *Kan* permainan itu akan semakin sulit celahnya/ruangnya apabila semakin banyak pihak yang ikut mengawasi. Semakin sedikit pihak yang mengawasi, maka peluang itu akan semakin banyak untuk memainkan.

Jadi saya usul pada kesempatan hari ini sebagai Anggota DPR yang tahu praktek-praktek permainan BBM ilegal itu saya minta masyarakat ikut berfungsi mengawasi dengan adanya transparansi perolehan BBM subsidi setiap SPBU yang memperolehnya. Jangan disembunyi-disembunyikan! Kalau disembunyi saya anggap itu ada *kongkalikong*. Pada kesempatan ini saya menggunakan hak politik saya sebagai wakil rakyat, saya minta itu dibuka dan setiap masyarakat bisa tahu berapa BBM subsidi yang diterima oleh SPBU setiap hari. Itu baru penerima. Kalau bisa sampai Ibu membuka sampai yang pembelinya itu lebih canggih lagi. Tapi sekarang tahap awal berapa dulu dia *nerima* kuota dari Pertamina, itu dulu permintaan saya.

Silakan ditanggapi, Bu.

WAKIL KETUA KOMISI XII (PUTRI ZULKIFLI HASAN, S.Mn., M.Bus./F-PAN):

Mungkin ini, Bapak-Ibu, terkait juga dengan waktu ya, tadi kita sudah perpanjang menjadi 12.30. Mungkin kita berikan kesempatan Ibu Kepala BPH Migas untuk menjawab juga menutup, baru nanti saya sampaikan kesimpulan ya. Nanti yang belum terjawab akan disampaikan tertulis *gitu*. Sepakat ya? Baik.

INTERUPSI F.P-GERINDRA (ROCKY CHANDRA):

Saya minta *statement* politik *aja*, satu kata *aja*, setuju atau tidak setuju, biar masyarakat dengar. Jawab yang tegas!

KEPALA BPH MIGAS (ERIKA RETNOWATI):

Mungkin izin, Bapak, saya *kan* tidak bisa mengambil keputusan sendiri ya, Pak, karena inikan komite ada sembilan orang. Jadi intinya kami sepakat kalau masyarakat itu bisa mendapatkan informasi. Tetapi *kan* memang ada juga informasi-informasi yang berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu tidak bisa kita berikan. Kalau sampai kabupaten/kota itu bisa kita informasikan. Tetapi kalau yang per SPBU itu tidak, Pak.

Baik, Pak, Nanti kami diskusikan di Komite dan juga dengan Badan usaha, Pak.

WAKIL KETUA KOMISI XII (PUTRI ZULKIFLI HASAN, S.Mn., M.Bus./F-PAN):

Baik.

Bapak-Ibu yang saya hormati,

Demikian jawaban dan penjelasan yang telah disampaikan oleh Kepala BPH Migas. *Nah*, sekarang saya izin untuk membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI dengan Kepala BPH Migas, Senin, 18 November 2024. Boleh ditampilkan mungkin.

Yang pertama, Komisi XII DPR RI meminta BPH Migas untuk memperketat pengendalian dan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi dengan melibatkan masyarakat agar lebih tepat sasaran serta menjamin ketersediaan pasokan BBM, khususnya untuk nelayan dan petani. Bisa disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Dua, Komisi XII DPR RI meminta BPH Migas untuk menyampaikan temuan-temuan terkait penyimpangan penggunaan BBM bersubsidi, rekomendasi pengawasan BPH Migas per provinsi serta data pembagian kuota BBM bersubsidi di semua lembaga penyalur. Dapat disetujui?

KEPALA BPH MIGAS (ERIKA RETNOWATI):

Sebentar, Bu. Mungkin kami juga boleh berpendapat *kan* dengan kesimpulan?

WAKIL KETUA KOMISI XII (PUTRI ZULKIFLI HASAN, S.Mn., M.Bus./F-PAN):

Boleh, silakan. Temuan-temuan penyimpangan di lapangan, Bu, seperti itu

KEPALA BPH MIGAS (ERIKA RETNOWATI):

Kemudian kalau itu temuan, kami bisa menyampaikan. Tapi tadi, Bu, yang untuk data pembagian kuota BBM per SPBU itu tidak boleh kita keluarkan, Bu, sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Mungkin kita bisa menyampaikan provinsi, kabupaten/kota yang bisa kita sampai.

INTERUPSI F-P.DEMOKRAT (Ir. H. MULYADI):

Sebentar, Bu. Coba sampaikan ke kita, Bu, undang-undang, kebetulan Menkum (Menteri Hukumnya) juga teman kita, tolong Ibu menerjemahkan yang menjadi rahasia negara. Saya juga tahu Undang-Undang Keterbukaan Publik yang tidak boleh itu yang menyangkut rahasia negara. Ini apa rahasia negara? Ini barang subsidi *kok* rahasia negara.

KEPALA BPH MIGAS (ERIKA RETNOWATI):

Nanti kami jawab tertulis ya, Pak.

WAKIL KETUA KOMISI XII (PUTRI ZULKIFLI HASAN, S.Mn., M.Bus./F-PAN):

Ini *nggak* bisa, di semua lembaga *nggak* bisa. Tolong dicoret yang ini, bagian bawah.

f

KEPALA BPH MIGAS (ERIKA RETNOWATI):

Mungkin untuk seluruh provinsi, kabupaten/kota bisa, Bu.

WAKIL KETUA KOMISI XII (PUTRI ZULKIFLI HASAN, S.Mn., M.Bus./F-PAN):

Per provinsi, kabupaten dan kota. Tapi tidak bisa untuk semua lembaga penyalur, *gitu* ya, Bu, tadi?

KEPALA BPH MIGAS (ERIKA RETNOWATI):

Iya.

INTERUPSI F-P.DEMOKRAT (Ir. H. MULYADI):

Inikan permintaan, Bu, bukan persetujuan, permintaan kita. *Nggak* ada masalah kita bicara. Masalah BPH tidak bisa memenuhi permintaan kita dengan alasan apapun *nggak* ada masalah. Tetap *aja* kalimatnya seperti ini. Ini bukan kesepakatan *loh*, permintaan Komisi XII.

WAKIL KETUA KOMISI XII (PUTRI ZULKIFLI HASAN, S.Mn., M.Bus./F-PAN):

Ini permintaan dari RDP hari ini. Jadi *nggak* apa-apa kita tetap tuliskan di situ ya, Bu.

Saya ulang ya. Nomor dua, Komisi XII DPR RI meminta BPH Migas untuk menyampaikan temuan-temuan terkait penyimpangan penggunaan BBM bersubsidi, rekomendasi pengawasan BPH Migas per provinsi serta data pembagian kuota BBM bersubsidi di semua lembaga penyalur. Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Oke.

Ketiga, Komisi XII DPR RI meminta BPH Migas agar menjadi mediator antara PT Pertamina Patra Niaga dengan SPBU untuk mengurangi potensi penyimpangan BBM bersubsidi selama proses pengiriman. Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Keempat, terakhir, Komisi XII DPR RI meminta.

INTERUPSI F-P.NASDEM (Dr. SYARIF FASHA, S.E., M.E.):

Pimpinan, di poin ketiga itu bukan hanya Patra Niaga dan SPBU, tapi ada transportir.

WAKIL KETUA KOMISI XII (PUTRI ZULKIFLI HASAN, S.Mn., M.Bus./F-PAN):

f

Kita tambahkan antara PT Pertamina Patra Niaga.

INTERUPSI F-P.NASDEM (Dr. SYARIF FASHA, S.E., M.E.):

SPBU dan Transportir.

WAKIL KETUA KOMISI XII (PUTRI ZULKIFLI HASAN, S.Mn., M.Bus./F-PAN):

SPBU koma dan *Transporting*.

INTERUPSI F-P.NASDEM (Dr. SYARIF FASHA, S.E., M.E.):

Transportir.

WAKIL KETUA KOMISI XII (PUTRI ZULKIFLI HASAN, S.Mn., M.Bus./F-PAN):

Dan *Transporting*.

INTERUPSI F-P.NASDEM (Dr. SYARIF FASHA, S.E., M.E.):

Transportir.

WAKIL KETUA KOMISI XII (PUTRI ZULKIFLI HASAN, S.Mn., M.Bus./F-PAN):

Ya. Berarti saya ulang ya. Tiga, Komisi XII DPR RI meminta BPH Migas agar menjadi mediator antara PT Pertamina Patra Niaga, SPBU dan Transportir untuk mengurangi potensi pengimbangan BBM bersubsidi selama proses pengiriman. Setuju?

INTERUPSI F-P.DEMOKRAT (Ir. H. MULYADI):

Pimpinan! Pimpinan! Izin, Pimpinan! Sebelum disetujui, Pimpinan!

WAKIL KETUA KOMISI XII (PUTRI ZULKIFLI HASAN, S.Mn., M.Bus./F-PAN):

Yang mana?

F-P.DEMOKRAT (Ir. H. MULYADI):

Ini yang poin ketiga, Pimpinan, mungkin bisa ditanyakan langsung dengan BPH Migas mereka setuju atau tidak. Kalau mereka setuju, kita minta kata-kata "meminta" itu diubah jadi "kesepakatan", Pimpinan.

WAKIL KETUA KOMISI XII (PUTRI ZULKIFLI HASAN, S.Mn., M.Bus./F-PAN):

Mungkin inikan baru RDP pertama. Tadi juga sudah disampaikan bahwa kita sifatnya *kan* memberikan kesimpulan, rekomendasi dari DPR dulu. Mungkin sampai situ dulu ya?

F-P.DEMOKRAT (Ir. H. MULYADI):

Nggak, maksud saya agar tidak menjadi bias kalau meminta saya bilang *kan*, kalau memang sekarang *kan* Kepala BPH Migas ada di sini. Kalau mereka memang BPH Migas bersepakat mau untuk bisa menjadi mediator antara Pertamina Patra Niaga, SPBU dan Transportir, diubah menjadi kata “kesepakatan”. Jadi lebih tajam hasil RDP kita pada hari ini. Mungkin itu saja, Pimpinan.

WAKIL KETUA KOMISI XII (PUTRI ZULKIFLI HASAN, S.Mn., M.Bus./F-PAN):

Silakan ditanggapi dulu, Ibu Kepala BPH Migas, tadi diubah menjadi bersepakat atau kesepakatan. Nomor tiga, pada poin nomor tiga.

KEPALA BPH MIGAS (ERIKA RETNOWATI):

Memintanya *kan*? Iya, bisa.

WAKIL KETUA KOMISI XII (PUTRI ZULKIFLI HASAN, S.Mn., M.Bus./F-PAN):

Bisa ya? Oke, baik. Kita ubah kembali ya. Nomor 3, Komisi XII DPR RI meminta Kepala BPH Migas, maaf ralat, Komisi XII DPR RI bersepakat dengan Kepala BPH Migas agar menjadi mediator antara PT Pertamina Patra Niaga, SPBU dan transportir untuk mengurangi potensi penyimpangan BBM bersubsidi selama proses pengiriman. Apakah dapat disetujui? Setuju.

(RAPAT: SETUJU)

Terakhir, Komisi XII DPR RI meminta Kepala BPH Migas untuk menyampaikan jawaban tertulis atas seluruh pertanyaan Anggota Komisi XII DPR RI dan disampaikan paling lambat pada tanggal 25 November 2024. Apakah dapat disetujui?

INTERUPSI F-P.GOLKAR (DEWI YUSTISIANA, S.H., M.Kn.):

Interupsi, Pimpinan!

Saya tadi ada poin yang saya menanyakan mengenai aturan yang menyatakan dan mengatur mengenai penerima BBM bersubsidi. Saya minta aturannya. Kalau memang sudah ada nanti tolong disampaikan *aja*. Tadi saya tidak jelas dengan jawaban dari Ibu Kepala.

WAKIL KETUA KOMISI XII (PUTRI ZULKIFLI HASAN, S.Mn., M.Bus./F-PAN):

Baik, kita tambah tadi poin nomor 4-nya, meminta aturan terkait penerimaan BBM bersubsidi untuk di kriteria yang berhak menerima BBM bersubsidi untuk disampaikan ke Komisi XII.

Ada yang mau ditambahkan?

INTERUPSI F-P.DEMOKRAT (Ir. H. MULYADI):

Pimpinan! Pimpinan!

Itu ada kata-kata Kepala BPH Migas. BPH Migas inikan kolektif kolegal. Kenapa dibunyikan BPH Migasnya, bukan Kepalanya *gitu*? Jadi persetujuan semua BPH Migas *gitu*, bukan hanya Kepalanya *gitu*. Mungkin teman-teman yang lain *giimana*? Tanggapi.

INTERUPSI F- PAN (AQIB ARDIANSYAH, M.Si.):

Izin, Pimpinan.

Nggak apa-apa. Pak Mul, sebenarnya Pak Mul paham juga, *nggak* apa-apa. Jadi *lead*-nya *kan*, *leader*-nya *kan* Menteri atau Kepala BPH, Kepala SKK *gitu*. Jadi yang dipakai ya Kepala BPH begitu, Pak.

WAKIL KETUA KOMISI XII (PUTRI ZULKIFLI HASAN, S.Mn., M.Bus./F-PAN):

Baik. Tadi ya, kita tambahkan ya poin nomor 4. *Oh*, maaf, Ibu Dewi, tadi poinnya kita rangkum di nomor 4. Jadi kita meminta kepada Kepala BPH Migas untuk menyampaikan jawaban tertulis atas seluruh pertanyaan. Berarti termasuk juga dari pertanyaan tadi mengenai kriteria penerima BBM bersubsidi, seperti itu.

INTERUPSI F-P.GOLKAR (DEWI YUSTISIANA, S.H., M.Kn.):

Mungkin dijelaskan sebetulnya aturannya sudah ada belum? Bisa interaktif satu menit *aja*.

WAKIL KETUA KOMISI XII (PUTRI ZULKIFLI HASAN, S.Mn., M.Bus./F-PAN):

Satu menit interaktif.

KEPALA BPH MIGAS (ERIKA RETNOWATI):

Sudah ada, Ibu. Jadi aturan mengenai konsumen pengguna itu ada di lampiran Perpres 191 Tahun 2014. Tetapi memang aturan itu kan masih terlalu umum *gitu*, sehingga kemudian kita *kan* mengusulkan revisinya *gitu*.

F-P.GOLKAR (DEWI YUSTISIANA, S.H., M.Kn.):

Oh, berarti belum ada ya, Bu? Soalnya *kan* yang sekarang itu dipermasalahkan oleh Patra Niaga karena itu sangat *general gitu*, Bu, itu yang menyebabkan sehingga tidak tepat sasaran, tidak tepat guna itu. Jadi kalau memang itu saya anggap belum ada berarti aturan yang mengatur secara spesifik kriteria yang benar, sehingga penyalurannya tepat sasaran. *Nah*, mungkin disampaikan dari Ibu sendiri terhadap permasalahan ini apa yang bisa disampaikan usulannya kepada kita.

Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI XII (PUTRI ZULKIFLI HASAN, S.Mn., M.Bus./F-PAN):

Baik, saya ulangi ya untuk poin nomor 4, Komisi XII DPR RI meminta Kepala BPH Migas untuk menyampaikan jawaban tertulis atas seluruh pertanyaan Anggota Komisi XII DPR RI dan disampaikan paling lambat pada tanggal 25 November 2024. Apakah dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

INTERUPSI F-P.DEMOKRAT (Ir. H. MULYADI):

Sedikit tanggapan, Pimpinan.

Bu, saya masih penasaran, Bu. Dulu saya sebetulnya salah satu yang mengusulkan agar subsidi ini diatur dalam undang-undang penyaluran pendistribusiannya. Tapi sampai sekarang dasar dari subsidi itu hanya Perpres dan Permen, betul? Penyalurannya selama ini saya lihat pola penyalurannya belum dalam bentuk undang-undang. *Nggak* ada undang-undang subsidi *kan* sampai saat ini? Maka dari itu saya juga mau belajar hukum dari Ibu, tolong saya diberi pencerahan bahwa kuota, jumlah kuota subsidi yang disalurkan itu adalah rahasia negara. Itu yang saya sampai sekarang mau belajar lagi saya hukum. Kalau memang ini ada aturannya tolong saya diberi tahu.

Terima kasih.

KEPALA BPH MIGAS (ERIKA RETNOWATI):

Jadi itu di dalam PPID itu apa ya, itu adalah salah satu data yang kita usulkan untuk dikecualikan untuk bisa terbuka, diinformasikan secara terbuka begitu, Pak. Iya, jadi bukan rahasia negara, Pak.

INTERUPSI F-P.DEMOKRAT (Ir. H. MULYADI):

Yang saya tanya tolong saya dikasih undang-undangnya. *Kan* Undang-Undang Keterbukaan Publik *kan* jelas itu definisi apa yang dimaksud dengan rahasia negara *kan*. Maka dari itu sejak kapan BPH bisa menerjemahkan bahwa subsidi itu adalah bagian dari rahasia negara yang sebetulnya ini harus diawasi publik malah terbaliknya harus dirahasiakan, kuota yang diterima oleh penyalur *nggak* boleh tahu. Apakah dalam rangka melindungi penyalur agar mereka tetap bermain *gitu*? Makanya tolong saya diberi tahu dengan pasal undang-undang yang jelas terkait dengan tadi Ibu masih keberatan dengan apa yang saya minta tadi.

Terima kasih.

KEPALA BPH MIGAS (ERIKA RETNOWATI):

Baik, Bapak, nanti kita jawab tertulis.

WAKIL KETUA KOMISI XII (PUTRI ZULKIFLI HASAN, S.Mn., M.Bus./F-PAN):

Tolong disampaikan juga nanti di jawaban tertulis ya, Bu.

Baik.

Bapak dan Ibu yang saya hormati,

Demikian pembahasan agenda rapat dengar pendapat kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri rapat, kami persilakan kepada Kepala BPH Migas untuk menyampaikan sambutan penutup. Kami persilakan.

KEPALA BPH MIGAS (ERIKA RETNOWATI):

Baik.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi XII dan Bapak-Ibu para Anggota Komisi XII,

Kami mengucapkan terima kasih atas semua masukan, tanggapan, saran dari Bapak-Ibu sekalian. Tentu akan menjadi perhatian dari kami untuk perbaikan kinerja kami ke depannya dan semoga ke depan kita bisa bersinergi untuk bersama-sama mewujudkan apa yang menjadi tujuan daripada tadi penyaluran BBM bersubsidi, kemudian juga tentang ketahanan energi.

Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI XII (PUTRI ZULKIFLI HASAN, S.Mn., M.Bus./F-PAN):

Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Kepala BPH Migas beserta jajarannya atas kerja samanya yang baik dalam rapat ini. Kami atas nama Pimpinan Komisi XII DPR RI juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Anggota Komisi XII DPR RI. Akhirnya dengan mengucapkan *hamdalah*, rapat dengar pendapat pada hari ini saya tutup.

*Wabillahit taufik wal hidayah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

(RAPAT DI TUTUP PUKUL 14.46 WIB)

**a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,**

**DWIYANTI, S.Sos.
196903131990032002**